

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN
TANGGAMUS**

TIM PENGUSUL

Dr. Helvi Yanfika, SP., M.E.P NIDN 0210018101, SINTA ID 6131432
Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.Si NIDN 0025045906, SINTA ID 6039682
Ir. Begem Viantimala, SP., M.Si NIDN 0007095604, SINTA ID 5998034

KATEGORI PENELITIAN DASAR

**JURUSAN AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

Judul Penelitian : **Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan**

Manfaat sosial ekonomi : **Identifikasi Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Mewujudkan masyarakat mandiri dan sejahtera**

Jenis penelitian penelitian dasar penelitian terapan
 pengembangan eksperimental

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : **Dr. Helvi Yanfika, SP.,M.E.P**
b. NIDN : **0210018101**
c. SINTA ID : **6131432**
d. Jabatan Fungsional : **Lektor/IIIc**
e. Program Studi : **Penyuluhan Pertanian**
f. Nomor HP : **081278311772**
g. Alamat surel (e-mail) : **helviyanfika@yahoo.co.id**

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : **Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S.**
b. NIDN : **0025045906**
c. SINTA ID : **6039682**
d. Program Studi : **Pernyuluhan Pertanian**

Anggota Peneliti (2)

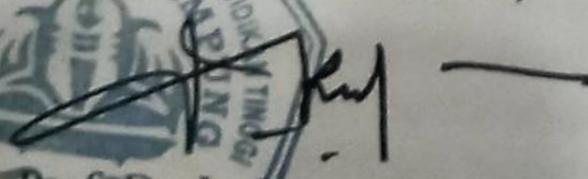
a. Nama Lengkap : **Ir. Begem Viantimala, M.Si**
b. NIDN : **0007095604**
c. SINTA Id : **5998034**
d. Program Studi : **Penyuluhan Pertanian**

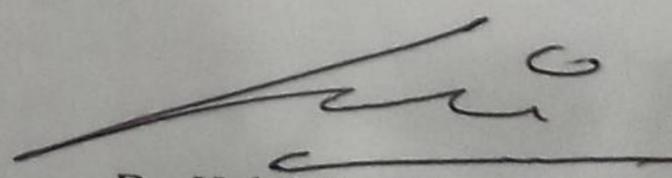
Jumlah mahasiswa yang terlibat: 1 : 1
Jumlah alumni yang terlibat : -
Jumlah staf yang terlibat : -
Lokasi kegiatan : **Kota Agung, Kabupaten Tanggamus**
Lama kegiatan : **5 (lima) Bulan**
Biaya Penelitian : **Rp. 35.000.000,00**
Sumber dana : **DIPA Unila**

B. Lampung, 21 Oktober 2019

Mengetahui,
Dekan Fakultas Pertanian,

Ketua Peneliti,


Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banuwa, M.Si.


Dr. Helvi Yanfika, SP., M.E.P
NIP. 198101102008122001

NIP. 19611020 198603 1 002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung,


Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.
NIP 19600119 198403 1 002

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kesejahteraan di Kabupaten Tanggamus

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Helvi Yanfika, SP., MEP	Ketua	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	Penyuluhan Pertanian	12
2	Dr. Ir. Kordiyana K Rangga, M.S	Anggota 1	Modal Sosial dan <i>rural development</i>	Agribisnis	8
3	Ir. Begem Viantimala, M.Si	Anggota 2	Penyuluhan dan Komunikasi	Penyuluhan Pertanian	8

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): Masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus yang berusaha pada perikanan tangkap (nelayan) sebagai komoditas utamanya. Objek penelitian merupakan rumah tangga nelayan
4. Masa Pelaksanaan
 Mulai : bulan Juli tahun 2019
 Berakhir : bulan November tahun 2019
5. Usulan Biaya : Rp. 35.000.000
6. Lokasi Penelitian : Lapangan
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya): Tidak ada.
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek)
 Model pemberdayaan dalam masyarakat pesisir menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Pemberdayaan dapat dijadikan sebagai strategi yang dapat menentukan keberhasilan penyuluhan sebagai upaya pengembangan kemandirian masyarakat pesisir di Provinsi Lampung. Temuan penelitian ini dapat mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat pesisir sehingga kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan keluarga dapat meningkat lebih baik.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah dan tahun rencana publikasi)
- Jurnal AGRARIS: *Journal of Agribusiness and Rural Development Research* terakreditasi berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3572/E5.2/SE/2017. Tahun 2020. Submit.
 - *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, tahun 2020. Jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus dengan Scimago Journal Rank sebesar 0.117. Link: <http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100463068&tip=sid&clean=0>

RINGKASAN

Model pemberdayaan masyarakat pesisir lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan menggunakan pendekatan *Rapid Rural Appraisal*, peningkatan teknologi tepat guna untuk usaha diversifikasi produk perikanan, sektor kelembagaan juga memberikan peranan dan meningkatkan ekonomi produktif masyarakat setempat dimana dari sektor kelembagaan ini akan tercipta beberapa kelompok usaha bersama (KUB) memudahkan bagi masyarakat untuk mengadakan transfer pengetahuan dan teknologi. Metode penelitian berupa survei guna mendapatkan data kuantitatif. Data kualitatif juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan observasi terhadap kondisi lapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara diskriptif (persentase dan rataan) dan secara inferensial (uji statistik regresi). Uji statistik regresi dilakukan untuk menjawab tujuan Pengolahan dan analisis data menggunakan komputer dengan software Excel for Windows, SPSS for Windows versi 17.0 dan Lisrel 8.0. Model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu model pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan ekonomi produktif dan pengembangan pelatihan serta pembinaan bagi nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama. Program perikanan tangkap secara umum sudah baik, kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Namun dalam implementasi kegiatan dan program pada KUB masih perlu ditingkatkan, karena bantuan program masih dirasakan oleh sebagian individu saja yang disebabkan rendahnya komunikasi antar anggota kelompok akibat pemahaman terhadap kebutuhan kelompok yang masih rendah. Evaluasi terhadap keberhasilan program KUB masyarakat menilai bahwa keberhasilannya masih rendah. Sedikit masyarakat yang merasa puas atas keberhasilan implementasi program KUB. Banyaknya masyarakat yang menilai kurang berhasil terhadap program KUB disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi para anggota terutama terkait keadilan dan transparansi bantuan dalam program KUB. Dari kondisi ini, maka perlu pendampingan terhadap kelompok untuk meningkatkan keberhasilan program KUB di Kabupaten Tanggamus. Strategi pengembangan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan meliputi 1) Pelatihan produk-produk hasil olahan ikan, 2) Pelatihan kepada masyarakat pesisir pantai tentang pelestarian laut dan lingkungan pesisir pantai, 3) Pembinaan kepada masyarakat terkait kewirausahaan, 4) Membatasi produk perikanan dari luar daerah, 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut dan lingkungan, 6) Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir terhadap dunia usaha. Konsep pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka yaitu pemberdayaan yang berbasis komunitas atau masyarakat untuk penguatan kemandirian nelayan.

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	
RINGKASAN	
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	2
1.3 Urgensi Penelitian	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Peralian Pesisir.....	5
2.2 Perkembangan Konsep Pemberdayaan.....	7
2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	11
2.4 Roadmap Penelitian.....	15
III. METODE PENELITIAN	16
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	16
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	16
3.3 Metode Analisis Data.....	17
IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH	20
A. Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus.....	20
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	23
5.1 Karakteristik Responden	23
5.1.1 Umur.....	23
5.1.2 Pendidikan.....	24
5.1.3 Pengalaman Usaha.....	25
5.1.4 Pekerjaan Sampingan.....	26
5.1.5 Pendapatan Utama.....	26
5.1.6 Pendapatan Sampingan.....	27
5.1.7 Jumlah Tanggungan.....	28
5.1.8 Pelatihan.....	29
5.2 Model Pemberdayaan Masyarakat.....	31
5.3 Potensi Pemberdayaan Masyarakat.....	32
5.4 Strategi Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir.....	34
5.4.1 Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat nelayan di Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus.....	39
5.5 Kendala dalam pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus.....	41
5.6 Kesesuaian dan Keberhasilan Program Bidang Perikanan Tangkap di Kabupaten Tanggamus.....	43

5.7 Program dan Bantuan pada Kelompok Usaha Bersama.....	46
5.8 Keterlibatan Masyarakat dan Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama.....	46
5.9 Strategi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Melalui Kelompok Usaha Bersama.....	46
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
1	Jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Tanggamus.....	21
2	Sebaran nelayan di Pesisir Kabupaten Tanggamus berdasarkan umur.....	23
3	Tingkat pendidikan nelayan di Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus.....	24
4	Sebaran responden berdasarkan pengalaman usaha.....	25
5	Sebaran responden berdasarkan pekerjaan sampingan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus.....	26
6	Sebaran responden berdasarkan pendapatan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus.....	27
7	Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan sampingan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus.....	28
8	Sebaran reponden berdasarkan jumlah tanggungan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus.....	29
9	Sebaran responden berdasarkan keikutsertaan nelayan dalam kegiatan pelatihan.....	29
10	Materi pelatihan.....	30
11	Potensi di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus.....	33
12	Program-Program Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Tanggamus selama 4 tahun terakhir.....	36
13	Penilaian nelayan terhadap program KUB.....	37
14	Kendala KUB di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus.....	38
15	Saran Perbaikan Sarana Nelayan Melalui KUB.....	38
16	Hasil analisis regresi linier berganda antara variabel X dan Y.....	39
17	Kendala dalam pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus.....	41
18	Cara yang dilakukan nelayan di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus dalam mempertahankan usaha.....	42
19	Gejala perubahan iklim di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus.....	43
20	Hal-hal yang dibutuhkan oleh nelayan dalam kondisi iklim tidak menentu di Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus.....	43
21	Evaluasi program bidang perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus.....	44
22	Matriks SWOT pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Tanggamus.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
1	Roadmap Penelitian.....	15
2	Komponen dalam analisis data.....	18
3	Keberhasilan implementasi program KUB di Kabupaten Tanggamus.....	47

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam berupa air, tanah, iklim serta faktor produksi lainnya secara lestari guna meningkatkan kemakmuran masyarakat khususnya nelayan dan pembudidayaan ikan.

Teluk Semangka merupakan perairan yang termasuk di dalam wilayah administrasi Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Perairan Teluk Semangka bersinggungan langsung dengan dua wilayah Kecamatan Cukuh Balak, Kota Agung, dan Wonosobo, mempunyai potensi kelautan dan perikanan yang cukup luas dan bervariasi, mulai dari potensi pengkapan ikan di laut, pengkapan ikan perairan umum, budidaya ikan/udang di tambak, serta budidaya ikan di kolam dan keramba/jaring apung.

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, Upaya pemberdayaan masyarakat tidak terlepas pada sumberdaya manusia sebagai objek dan pelaku kegiatan untuk meningkatkan taraf kehidupannya, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keberadaan dan peranan organisasi non-pemerintah.

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun budidaya ikan, namun dalam pengembangannya, sektor kelautan dan perikanan mempunyai banyak kendala dan masalah, Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Tanggamus adalah masih sedikitnya investor/penanaman modal dari dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan potensi tersebut.

Keberadaan kelompok usaha masyarakat pesisir selama ini masih berada dibawah standar pasar nasional. Hal ini dipicu dengan belum terjaminnya mutu dan kualitas produk yang dihasilkan, kendala utama dalam hal pemasaran dan penentuan harga pokok lebih didominasi oleh proses produksi yang masih

tradisional terutama dalam pengemasan produk. Belum terpenuhinya standar operasional produk dapat memberikan persepsi yang kurang baik bagi para konsumen untuk membeli produk tersebut. Kelompok yang sudah terbentuk tidak mengalami peningkatan dari segi kuantitas dan kualitasnya, karena tujuan yang ingin dicapai belum terarah dengan baik. Adanya desentralisasi peranan kelompok masih nampak sehingga masih terdapat budaya depensi antar setiap anggota. Untuk dapat merubah dan mengembangkan potensi yang ada perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi sumber daya manusia setempat sehingga keterampilan dan sikap masyarakat dapat merubah kerah yang lebih maju.

Model pemberdayaan masyarakat pesisir lebih diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendampingan dan pelatihan menggunakan pendekatan *Rafid Rural Appraisal*, peningkatan teknologi tepat guna untuk usaha diversifikasi produk perikanan, sektor kelembagaan juga memberikan peranan dan meningkatkan ekonomi produktif masyarakat setempat dimana dari sektor kelembagaan ini akan tercipta beberapa kelompok usaha bersama (KUB) memudahkan bagi masyarakat untuk mengadakan transfer pengetahuan dan teknologi.

Dari fenomena tersebut dapat diteliti lebih jauh tentang Peningkatan Kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus, yaitu dengan mengamati keragaan kegiatan ekonomi masyarakat pesisir, identifikasi sarana dan prasarana, dan identifikasi sumberdaya pesisir. Dari data tersebut kemudian dirumuskan suatu konsep model pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus secara spesifik.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi model-model pemberdayaan masyarakat pesisir Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus
2. Mengidentifikasi potensi dan faktor-faktor pendukung pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Kelompok Usaha Bersama Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus
3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dari model pemberdayaan masyarakat pesisir di Teluk Semangka Kabupaten Tanggamus

4. Menghasilkan konsep pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Kelompok Usaha Bersama di Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus.

1.3. Urgensi Penelitian

Indonesia memiliki potensi laut yang sangat besar. Namun, selama ini potensi laut tersebut belum dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa pada umumnya, dan pemasukan devisa negara khususnya. Bahkan, sebagian besar hasil pemanfaatan laut selama ini justru “lari” atau “tercuri” ke luar negeri oleh para nelayan asing yang memiliki perlengkapan modern dan beroperasi hingga perairan Indonesia secara ilegal.

Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam kerangka pengembangan wilayah, akan lebih efektif bila dilaksanakan secara bersama-sama dari seluruh stakeholder yang terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Otonomi daerah telah membuka peluang desentralisasi pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ini penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan banyak memiliki daerah terisolasi, miskin alat transportasi dan komunikasi, masih lemah sistem administrasi pemerintahannya, masih kurangnya kapasitas SDM, serta begitu banyaknya masyarakat yang menggantungkan kehidupan dan nafkahnya pada sumberdaya pesisir dan laut, dengan demikian, antara pemerintah dan masyarakat akan semakin dekat dan terpetakan berbagai masalah yang dihadapi sebagian besar masyarakat.

Pembangunan perekonomian daerah, terutama yang didasarkan pada sumberdaya wilayah pesisir dan laut dapat dilakukan dengan lebih baik dan memperhatikan kelestarian lingkungan, sehingga didapat konsep pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan yang berkelanjutan juga mengusahakan agar hasil pembangunan terbagi secara merata dan adil pada berbagai kelompok dan lapisan masyarakat serta antar generasi karena pembangunan berkelanjutan ini berwawasan lingkungan. Wilayah pesisir dan laut dengan segala karakteristiknya menjadi satu potensi yang patut dijaga dan

dikembangkan sebagai sumber perekonomian daerah, sehingga dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Melalui Kelompok Usaha Bersama yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Kelompok Usaha Bersama diarahkan kepada upaya mempercepat penghapusan kemiskinan, melalui a) Peningkatan kemampuan berusaha para anggota Kelompok Usaha Bersama secara bersama dalam kelompok, b) Peningkatan pendapatan, c) Pengembangan usaha, d) Peningkatan kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para anggota Kelompok Usaha Bersama dan dengan masyarakat sekitar.

Hal yang perlu diketahui dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Kelompok Usaha Bersama adalah tingkat pendapatan usaha dan kelayakan usaha kegiatan ekonomi tersebut untuk dikembangkan. Aspek yang menjadi kajian dalam menganalisis kelayakan usaha meliputi aspek pasar, aspek potensi sumberdaya kelautan, aspek sarana dan prasarana, aspek teknis, aspek sosial, dan aspek finansial.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perairan Pesisir

Perairan pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.

Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir. Dalam kacamata ekonomi wilayah, berbagai kawasan pesisir yang memiliki posisi strategis di dalam struktur alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi disebut memiliki *locational rent* yang tinggi. Nilai ekonomi kawasan pesisir, selain ditentukan oleh rent lokasi (*locational rent*), setidaknya juga mengandung tiga unsur *economic rent* lainnya, yakni: *ricardian rent*, *environmental rent* dan *social rent*. *Ricardian rent* adalah rent berdasarkan kekayaan dan kesesuaian sumberdaya yang dimiliki untuk berbagai penggunaan aktivitas ekonomi, seperti kesesuaiannya (*suitability*) untuk berbagai aktivitas budidaya (tambak), kesesuaian fisik untuk pengembangan pelabuhan, dan sebagainya. *Environmental rent* kawasan pesisir adalah nilai atau fungsi kawasan yang didasarkan atas fungsinya di dalam keseimbangan lingkungan, sedangkan *social rent* menyangkut manfaat kawasan untuk berbagai fungsi sosial. Berbagai nilai-nilai budaya masyarakat banyak yang menempatkan kawasan pesisir sebagai kawasan dengan fungsi-fungsi sosial tertentu (Rustiadi, 2001). Di dalam mekanisme pasar, pada umumnya hanya *locational* dan *ricardian rent* yang telah terinternalisasi di dalam struktur nilai pasar, akibatnya berbagai fungsi

lingkungan dan sosial kawasan pesisir banyak mengalami degradasi dan tidak mendapat penilaian yang semestinya.

Peranan strategis wilayah pesisir hanya tercapai jika memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: (1) Basis ekonomi (*economic base*) wilayah yang bertumbuh atas sumberdaya-sumberdaya domestik yang terbaharui (*domestic renewable resources*), (2) Memiliki keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) terhadap berbagai sektor ekonomi lainnya di daerah yang bersangkutan secara signifikan sehingga perkembangan sektor basis dapat menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) terhadap perkembangan sektorsektor lainnya di daerah yang bersangkutan, (3) Efek ganda (*multiplier effect*) yang signifikan dari sektor basis dan sektor-sektor turunan dan penunjangnya dengan penciptaan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat (sektor rumah tangga), sektor pemerintah lokal/daerah (sektor pajak/retribusi) dan PDRB wilayah, (4) Keterkaitan lintas regional di dalam maupun antar wilayah yang tinggi (*interand inter-regional interaction*) akan lebih menjamin aliran alokasi dan distribusi sumberdaya yang efisien dan stabil sehingga menurunkan ketidakpastian (*uncertainty*), dan (5) Terjadinya *learning process* secara berkelanjutan yang mendorong terjadinya koreksi dan peningkatan secara terus menerus secara berkelanjutan.

Untuk mencapai pembangunan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal, berkelanjutan dan andal, salah satu aspek yang sangat penting adalah aspek sosial, ekonomi dan budaya. Aspek ini mensyaratkan bahwa masyarakat pesisir sebagai pelaku dan sekaligus tujuan pembangunan wilayah pesisir dan lautan harus mendapatkan manfaat terbesar dari kegiatan pembangunan tersebut. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan yang didapatkan justru dinikmati oleh penduduk di luar wilayah pesisir. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir yang harus diterapkan adalah (Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, 1998):

1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.

2. Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.
3. Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.

2.2. Perkembangan Konsep Pemberdayaan

Saat ini konsep "pemberdayaan" telah masuk ke berbagai disiplin ilmu, baik pada tataran teori maupun praktik sehingga memiliki makna yang berbeda. Dari sisi paradigma, pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk mewujudkan masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dari sisi ilmu sosiologi, pemberdayaan dimaknai sebagai upaya mengurangi diskriminasi sosial yang dialami sekelompok orang karena perbedaan ras, etnik, religi, dan atau gender. Dari sisi pembangunan ekonomi, pemberdayaan menfokuskan pada upaya memobilisasi kemampuan diri dari golongan miskin dengan menyediakan program kesejahteraan sosial untuk mereka. Di bidang politik, pemberdayaan adalah perjuangan untuk menegakkan hak-hak sipil serta kesetaraan gender. Bahkan, istilah "pemberdayaan" telah menjadi suatu kata yang bersifat plastis dan digunakan dalam berbagai konteks, sehingga dapat mengaburkan makna yang sebenarnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pandangan UNICEF (1997) pendekatannya bertumpu pada risiko di keluarga, kebutuhan dan hak-haknya dalam rangka menentukan prioritas dan strategi pembangunan. Ada lima masalah pokok yang silih berganti, yakni tingkat kematian ibu yang tinggi, kekurangan gizi ibu dan anak, rendahnya tingkat pendidikan atau kualitas pendidikan yang rendah, penyakit HIV-AIDS dan psikotropika, serta anak-anak yang memerlukan upaya perlindungan khusus. Hasil kajian UNICEF menunjukkan bahwa intervensi paling strategis adalah pada kelompok remaja, kelompok yang menempati posisi terbesar dari penduduk negara kita. Dalam pertimbangan sosial dan ekonomi, kelompok remaja (10-19 tahun) merupakan kelompok yang akan memasuki pasar kerja, sehingga potensinya untuk menjadi pekerja yang disiplin, terampil dan fleksibel harus dimaksimalkan. Kegagalan intervensi pada fase ini

akan menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi di kemudian hari sebagai akibat urbanisasi, pengangguran, frustrasi, yang berakibat pada peningkatan kriminalitas, penggunaan obat terlarang, dan sebagainya. Dari sisi ilmu penyuluhan pembangunan, Slamet (2003: 45) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mencakup beberapa pengertian berikut:

- merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pembangunan,
- bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri (memperbaiki kehidupannya sendiri),
- masyarakat mengerti, memahami, termotivasi, berkesempatan, melihat peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mengetahui berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani menghadapi risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, dan mampu bertindak sesuai situasi.

Melalui program-program penyuluhan pembangunan segala macam informasi, teknologi, kesempatan berlatih dan berorganisasi serta bekerjasama dapat diakses relatif mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa mendapatkan alternatif dan memiliki kebebasan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya. Dengan demikian pemberdayaan pada akhirnya mampu menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan.

Pranarka dan Vidyandika (Tampubolon, 2006) mengemukakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua arti. *Pertama*, pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini biasanya dilengkapi dengan upaya pemberian aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Proses ini disebutnya sebagai kecenderungan primer. *Kedua*, proses menstimuli, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder.

Dari beberapa kutipan di atas menunjukkan bahwa pemberdayaan ialah sebuah ide yang kompleks, yang mencakup transfer kekuasaan atau daya secara dinamis dalam kurun waktu tertentu. Daulay, Dirjen Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial (2005: i) menggunakan istilah pemberdayaan masyarakat

sebagai terjemahan dari *community development*. Di lain pihak banyak ahli menterjemahkan *community development* dengan istilah yang berbeda-beda seperti pengembangan masyarakat, pembangunan masyarakat, pembangunan komunitas, pengembangan komunitas, dan sebagainya.

Payne (Rukminto Adi, 2003: 54) menyatakan proses pemberdayaan pada intinya ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.

Shardlow (Rukminto Adi, 2003: 54) menyatakan bahwa berbagai pengertian pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sementara itu, Jahi (2006) menyatakan bahwa ada dua cita rasa pemberdayaan, yaitu:

1. yang memberi manfaat baik kepada pihak yang memberi kuasa maupun kepada pihak yang mendapat kuasa. Tipe inilah yang disebut sebagai pemberdayaan (*empowerment*).
2. kekuasaan didapat oleh pihak yang sebelumnya tidak berkuasa melalui perjuangan sendiri. Hal ini disebut sebagai "*self-empowerment*" atau memberdayakan diri.

Kedua tipe pemberdayaan tersebut mengandung pemberdayaan sendiri, sebab: (a) tahap krusial pada pihak yang terlibat ialah perubahan alam pikiran dan situasi kehidupan mereka yang diberdayakan itu; (b) pemberdayaan mencakup peningkatan kesadaran. Ia juga mencakup lebih dari sekedar perubahan kekuasaan, sebagai akibat dari perubahan struktur dan tata-nilai lama; (c) elemen kesadaran dan pertimbangan yang tinggi dari kedua belah pihak yang terlibat, yang didapat dari solusi menang-menang (*win-win*) menyediakan kesempatan bagi kemajuan untuk hidup yang lebih sejahtera bagi semua yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu orang-orang agar dapat menolong diri mereka sendiri atau upaya untuk memimpin orang-orang agar belajar memimpin diri mereka sendiri dalam menggapai tujuannya. Agar tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai, diperlukan beberapa persyaratan berikut:

1. Kemandirian masyarakat lokal, otonomi dalam pembuatan keputusan pada tingkat desa, dan partisipasi langsung yang demokratis dalam proses pemerintahan melalui perwakilan. Hal ini menyiratkan bahwa masyarakat yang berdaya harus mempunyai kemandirian (bersifat mandiri), mampu membuat atau mengambil keputusan.
2. Adanya ruang bagi ekspresi budaya dan kesejahteraan spiritual dan *experiential social learning*. Masyarakat yang berdaya harus memiliki kebebasan berekspresi, termasuk ekspresi budaya yang dimilikinya tanpa adanya rasa khawatir terhadap pihak lain. Mereka mau dan mampu belajar dari pengalaman hidup bermasyarakat untuk memperbaiki sistem sosialnya.
3. Akses pada lahan dan sumberdaya lain, pendidikan untuk perubahan, dan perumahan dan fasilitas kesehatan. Masyarakat yang berdaya memiliki akses pada lahan dan sumberdaya lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akses pada pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas berpikir; memiliki rumah yang layak untuk tinggal bersama keluarganya, serta memiliki akses pada pelayanan kesehatan yang memadai.
4. Akses pada pengetahuan dan keterampilan (internal maupun external) untuk menjaga stok modal alami dan lingkungan secara sinambung. Pengetahuan dan keterampilan merupakan modal utama bagi seseorang atau sekelompok orang agar dapat berdaya dan mandiri.
5. Akses pada pelatihan keterampilan, teknik-teknik pemecahan masalah, teknologi tepat guna dan informasi. Pengetahuan dan keterampilan tersebut dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi sehingga ia tidak tergantung pada pihak lain.
6. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan oleh semua orang, terutama wanita dan pemuda. Keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan dan

melibatkan semua elemen masyarakat akan menjamin terlaksananya program pemberdayaan yang ditrencanakan.

Konsep pemberdayaan telah mewarnai beberapa paradigma pembangunan. Pada tataran kehidupan bernegara, pemberdayaan dimaknai sebagai partisipasi yang setara antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (Syahyuti, 2006: 212). Dengan demikian, pemerintah, swasta dan masyarakat memiliki tanggungjawab yang sama dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan. Pemerintah sebagai institusi formal berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di segala sektor. Swasta dapat berperan sebagai patner pemerintah dalam pelaksanaan pada satu atau beberapa sektor pemba-ngunan. Masyarakat harus berperan sebagai subyek dan obyek pembangunan dengan pengertian bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, melakukan evaluasi, dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat

Spreitzer (1996) menyatakan bahwa dukungan sosial politik yang kuat, akses terhadap informasi, dan iklim untuk berpartisipasi berhubungan erat dengan persepsi manajerial dalam pemberdayaan. Hasil kajian selanjutnya menyatakan bahwa karakteristik struktur sosial (persepsi terhadap peran ganda atau peran yang ambigu, rentang kendali (*span of control*), dukungan sosial politik, akses terhadap informasi, dan suasana kerja berhubungan nyata dengan sistem keterlibatan yang tinggi.

Proses pemberdayaan selalu berhubungan dengan kekuasaan:

1. *Power over*: Kekuasaan untuk mengatur seseorang atau sesuatu. Respon pada kekuasaan ini bisa berupa kepatuhan, penolakan atau manipulasi.
2. *Power to*: kekuasaan yang bersifat generatif atau produktif yang menciptakan peluang dan aksi tanpa dominasi.
3. *Power with*: kekuasaan yang menimbulkan suatu perasaan bahwa keseluruhan itu lebih besar dari jumlah seluruh individu yang ada dan aksi kelompok lebih efektif.

4. *Power from within*: suatu perasaan adanya kekuatan dalam setiap orang. Pengakuan pada penerimaan dan penghargaan pada diri sendiri memungkinkan penerimaan orang lain sebagai sesama.

Hampir seluruh definisi pemberdayaan mencakup dimensi *power over*, misalnya akses pada pembuatan keputusan. Sebaliknya, *power with* menunjukkan kekuasaan kolektif. Banyak LSM Wanita di belahan bumi selatan melakukan perubahan bersama-sama dengan pihak lain. Maksud *power within* ialah diri anda ataupun para petani binaan haruslah diperkuat. Dalam hubungan ini, pemberdayaan ialah suatu proses sehingga *stakeholders* dapat berubah dari tidak berdaya (“kami tidak mampu”) menjadi percaya diri secara kolektif (“kami mampu”).

Selain faktor kekuasaan, pemberdayaan juga melibatkan aspek kognitif, psikologis, ekonomi dan politik.

- (1) Aspek kognitif menunjukkan kemampuan *stakeholders* untuk memahami situasi subordinasi dalam masyarakat pada tingkat mikro maupun makro, dan juga kemampuan membuat keputusan untuk mengubah kebudayaan dan norma yang menghambat perkembangan mereka.
- (2) Aspek psikologis menunjukkan kemampuan *stakeholders* untuk mengembangkan sikap bahwa mereka mampu memperbaiki situasi dan akan berhasil.
- (3) Aspek ekonomi menunjukkan bahwa *stakeholders* harus memiliki aktivitas yang produktif agar memiliki penghasilan dan otonomi keuangan untuk mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- (4) Aspek politik menunjukkan kapasitas *stake holders* untuk menganalisis situasi sosial-politik dan kemampuan mereka mengorganisasi dan memobilisasi rekan-rekannya untuk melakukan perubahan sosial.

Karsidi (2003: 177—178) menyebutkan beberapa aspek penting yang perlu mendapat perhatian dalam pemberdayaan masyarakat tani dan nelayan:

- (1) Pengembangan organisasi atau kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat.
- (2) Pengembangan jaringan strategis antar kelompok atau organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan.

- (3) Kemampuan kelompok tani dan nelayan dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk di dalamnya kemampuan lobi ekonomi. Hal ini lebih dikenal sebagai kemampuan memanfaatkan jaringan ekonomi.
- (4) Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik.

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat memerlukan kelompok masyarakat yang memiliki dinamika, sehingga dapat membantu anggota dan kelompoknya untuk lebih mandiri. Lebih lanjut, Karsidi (2003: 176) menyatakan, untuk mewujudkan kemandirian petani dan nelayan dapat ditempuh dengan berbagai upaya berikut: (a) memulai dengan tindakan mikro dan lokal; (b) pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah); (c) mengganti pendekatan wilayah administratif dengan pendekatan kawasan; (d) membangun kembali kelembagaan masyarakat; (e) mengembangkan penguasaan teknis; (f) pengembangan kesadaran dan proses demokratisasi ekonomi; (g) membangun jaringan ekonomi strategis; dan (h) kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberdayaan.

Proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan memandirikan sasaran merupakan proses pembelajaran masyarakat agar supaya mereka memiliki pengetahuan, keterampilan atau keahlian (skill), dan sikap yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Sebagai proses belajar, Klausmeier dan Goodwin dalam Asngari (2001: 26) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran jangka pendek maupun jangka panjang tersebut dipengaruhi oleh tujuh faktor berikut:

- (1) Ciri-ciri anak didik, yang meliputi (a) kematangan mental dan kemampuan intelektualitas, (b) kematangan fisik dan kemampuan psikomotorik, (c) ciri-ciri afektif, (d) persepsi, (e) kesehatan, (f) umur, dan (g) jenis kelamin.
- (2) Ciri agen pembaruan (penyuluh), yang meliputi (a) pengetahuan dan kemampuan intelektualitas, (b) ciri-ciri fisik dan psikomotorik, (c) ciri afektif, (d) persepsi, (e) kesehatan, (f) umur, dan (g) jenis kelamin.

- (3) Perilaku agen pembaruan (penyuluh) yang mencakup (a) proses belajar, (b) metode mengajar, dan (c) interaksi guru dan murid.
- (4) Ciri kelompok, mencakup (a) jumlah atau besar kelompok, (b) struktur kelompok, (c) sikap mental, (d) kekompakan, dan (e) kepemimpinan.
- (5) Mata ajaran, mencakup (a) makna, (b) organisasi, dan (c) tipenya.
- (6) Ciri fisik fasilitas, meliputi (a) ruangan, (b) alat perlengkapan, dan (c) media.
- (7) Kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi anak didik, yakni (a) keluarga, (b) masyarakat lingkungan, dan (c) pengaruh kebudayaan secara luas.

Pemberdayaan ekonomi merupakan kegiatan terprogram dalam meningkatkan produksi dan produktivitas pelaku usaha. Langkah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan agroindustri di Provinsi Lampung lebih terfokus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam mengembangkan usaha termasuk kegiatan agribisnis berbasis komoditas lokal tertentu. Program yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat berupa penyuluhan, pendampingan, pelatihan, dan bimbingan usaha kepada anggota kelompok masyarakat sasaran. Dengan program tersebut diharapkan anggota kelompok dapat meningkat pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya sehingga mampu meningkatkan aktivitas produksi dan pendapatan usahanya. Di lain pihak, pemerintah / pemerintah daerah juga melaksanakan kegiatan pembangunan melalui kegiatan sejenis, meskipun jangkauan kegiatannya belum menyentuh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat sekitar perusahaan. Dengan demikian, kegiatan CSR dapat bersifat komplementer (saling melengkapi) atau bahkan terjadi tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah / pemerintah daerah. Keberhasilan program pemberdayaan tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberdayaan ekonomi masyarakat yang salah satunya dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan rumah tangga, yang sekaligus juga mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat (petani) melalui implementasi tanggung jawab sosial perusahaan diarahkan pada pengembangan usaha ekonomi rumah tangga dengan memperhatikan potensi sumberdaya lokal serta potensi pasar terhadap komoditas yang diusahakan. Perilaku masyarakat dalam memberdayakan ekonomi diri dan keluarga merupakan indikator sejauh mana

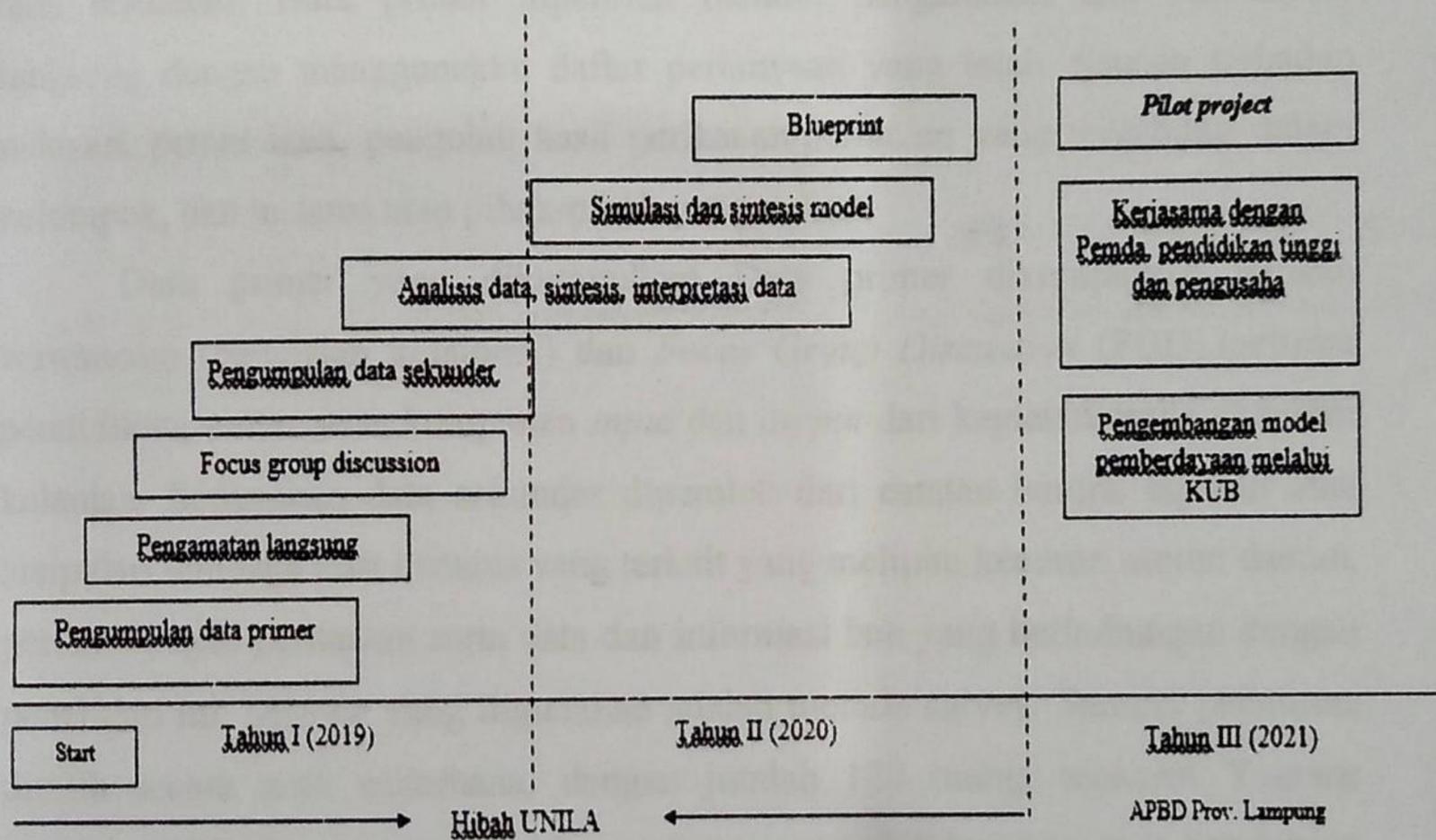
program pemberdayaan ekonomi masyarakat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian perilaku masyarakat (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif menjadi peubah terikat.

2.4 Roadmap Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu tahun I, tahun II

Roadmap Penelitian

Secara ringkas tahap penelitian ini disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Roadmap Penelitian |

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Provinsi Lampung, di Kabupaten Tanggamus, di Kecamatan Limau dan Kecamatan Kota Agung. Penelitian sampai dengan penyusunan laporan dilaksanakan pada bulan Juli – November 2019.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terhadap nelayan, petani ikan, pengolah hasil perikanan/pertanian yang tergabung dalam kelompok, dan instansi atau pihak-pihak yang terkait.

Data primer yang dikumpulkan Data primer dikumpulkan dengan wawancara (pengisian kuisisioner) dan *Focus Group Discussion* (FGD). meliputi pendidikan, umur, serta komponen *input* dan *output* dari kegiatan/usaha ekonomi kelautan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari catatan berupa laporan atau arsip dari lembaga atau instansi yang terkait yang meliputi keadaan umum daerah, perkembangan perikanan serta data dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah metode survey. Sampel penelitian dipilih secara acak sederhana, dengan jumlah 120 orang, menurut Yamane (Rahmat, 2002:82), untuk menghitung ukuran sampel didasarkan pada pendugaan proporsi populasi. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N\alpha^2 + 1}$$

Keterangan: n = jumlah sampel

N = populasi

α = 1 - presisi (tingkat kepercayaan)

Agar data yang dikumpulkan dapat secara akurat, maka diperlukan definisi operasional yang dapat menggambarkan indikator yang dapat diamati serta parameter yang sesuai untuk mengukur besaran setiap peubah. Pengukuran terhadap peubah, indikator, dan parameter dilakukan dengan cara yang sama, yakni berdasarkan suatu kontinum yang dinyatakan dalam bentuk nilai skor.

Karena setiap peubah memiliki jumlah indikator dan parameter yang tidak sama, maka untuk mengklasifikasikan suatu peubah indikator atau parameter tersebut perlu dilakukan transformasi terlebih dahulu ke dalam bentuk indeks. Berdasarkan jumlah nilai skor indeks tersebut kemudian dilakukan pengklasifikasian selanjutnya. Dengan demikian, bias yang ditimbulkan akibat jumlah parameter dan indikator yang tidak sama dalam mengukur suatu peubah dapat dihindari sekecil mungkin.

Penyajian data ordinal untuk keperluan uji statistik parametrik, terlebih dahulu dilakukan transformasi data dengan menggunakan rumus transformasi sebagai berikut:

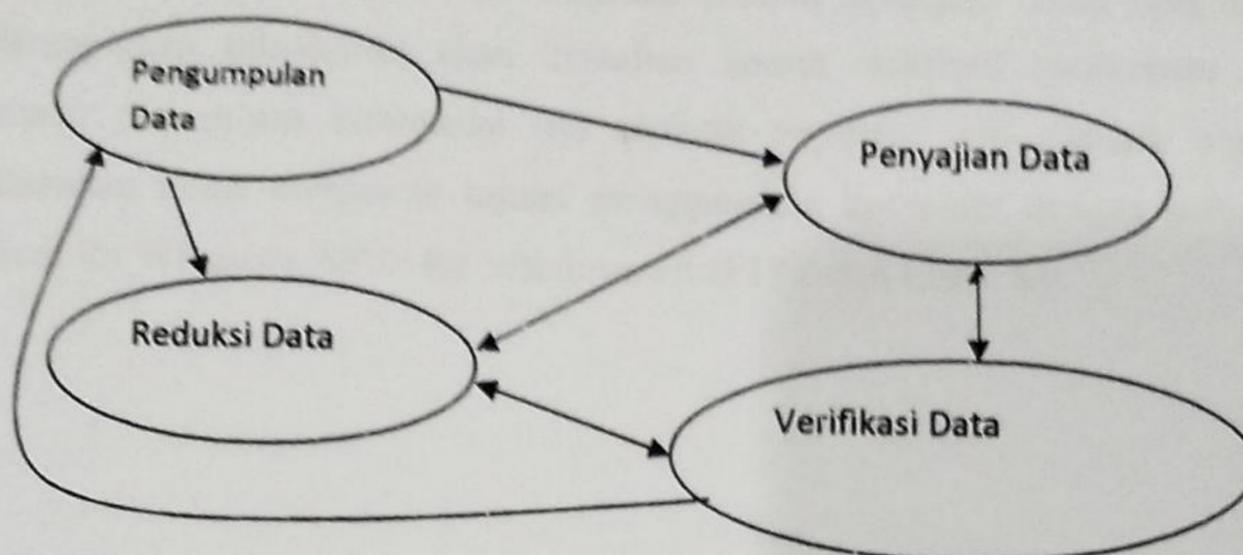
$$\text{Indeks Transformasi} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh per indikator dikurangi jumlah skor terkecil}}{\text{Jumlah skor maksimum dikurangi jumlah skor terkecil}}$$

3.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiono (2002), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*. Komponen dalam analisis data terdiri dari:

1. *Data reduction* atau reduksi data yaitu merangkum dan memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.
2. *Data display* (penyajian data) setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.
3. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Menurut pandangan Milles dan Huberman penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan

juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada Gambar 2 :



Gambar 2. Komponen dalam analisis data

Ketepatan analisis data pada penelitian ini sangat tergantung pada kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu peneliti melakukan uji validitas dan reabilitas untuk memperoleh pembuktian yang valid dan reliabel. Validitas menunjukkan sejauhmana alat pengukur yang digunakan dalam penelitian mengukur apa yang ingin diukur.

Uji reabilitas menunjukkan sejauhmana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reabilitas dengan kata lain menunjukkan konsistensi suatu alat ukur untuk mengukur gejala yang sama. Dalam penelitian ini uji validitas dan uji reabilitas terhadap instrumen yang digunakan yaitu kuesioner dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada beberapa calon responden mengenai pertanyaan-pertanyaan sebagaimana yang terdapat dalam kuesioner. Dari jawaban yang diperoleh dari responden tersebut, peneliti membuat beberapa konsep yang bersifat operasional yang sekiranya belum tercantum dalam kuesioner.

Perolehan kesahihan data yang diperoleh, peneliti juga melakukan triangulasi terhadap sumber data yakni melalui *crosscheck* terhadap data hasil wawancara setiap informasi dan responden dengan data yang diperoleh dari literatur. Triangulasi juga dilakukan terhadap metode, yakni *crosscheck* data diperoleh melalui wawancara mendalam, wawancara berstruktur dengan data yang diperoleh melalui observasi langsung.

Metode penelitian berupa survei guna mendapatkan data kuantitatif. Data kualitatif juga dikumpulkan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan observasi terhadap kondisi lapangan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara diskriptif (persentase dan rataan) dan secara inferensial (uji statistik regresi). Uji statistik regresi dilakukan untuk menjawab tujuan menggunakan komputer dengan software Excel for Windows, SPSS for Windows versi 17.0 dan Lisrel 8.0.

BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH

A. Keadaan Umum Kabupaten Tanggamus

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lampung Tengah di sebelah utara, Samudera Indonesia pada bagian selatan, Kabupaten Lampung Barat pada bagian barat dan Kabupaten Pringsewu pada bagian timur. Letak astronomis Kabupaten Tanggamus berada pada $5^{\circ}05'$ dan $5^{\circ}56'$ Lintang Selatan dan antara $104^{\circ}18'$ dan $105^{\circ}12'$ Bujur Timur. Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah seluas $2.855,46 \text{ Km}^2$ wilayah daratan dan $1,779,50 \text{ Km}^2$ wilayah lautan.

Suhu udara rata-rata di Kabupaten Tanggamus yaitu bersuhu sedang, hal tersebut disebabkan karena Kabupaten Tanggamus berada pada ketinggian 0 sampai dengan 2.115 mdpl sehingga suhu di Kabupaten Tanggamus sangat bervariasi. Wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri dari wilayah daratan, perbukitan, dan laut. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tanggamus memiliki batas-batas:

1. Utara – Kabupaten Lampung Barat, dan Lampung Tengah;
2. Selatan – Samudera Indonesia;
3. Barat – Kabupaten Lampung Barat;
4. Timur – Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Tanggamus memiliki 2 (dua) sungai utama yang melintasi daerah-daerah tersebut, kedua sungai itu adalah Way Sekampung dan Way Semangka. Selain kedua sungai utama, terdapat juga beberapa sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Tanggamus antara lain: Way Pisang, Way Gatal, Way Semah, Way Sengarus, Way Bulok dan Way Semuong.

Penduduk Kabupaten Tanggamus berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 586.624 jiwa yang terdiri atas 305.594 jiwa penduduk laki-laki dan 281.030 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Tanggamus mengalami pertumbuhan sebesar 1,08 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017

penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 108.74. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tanggamus tahun 2017 mencapai 126 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 2017 cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan gisting dengan kepadatan sebesar 1.224 jiwa/km dan terendah di Kecamatan Limau sebesar 73 jiwa/Km.

Jumlah rumah tangga perikanan tangkap menurut subsektor tahun 2017 yaitu perikanan laut (5.704 rumah tangga), terdapat peningkatan daripada tahun sebelumnya yang berjumlah 5.698 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kabupaten Tanggamus (1.389 rumah tangga).

Tabel 1 menunjukkan jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Tanggamus tahun 2016 sampai 2017. Jumlah masyarakat yang bekerja di sektor perikanan atau sebagai nelayan paling banyak ada di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Teluk Semaka. Secara rinci jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Tanggamus disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah rumah tangga nelayan di Kabupaten Tanggamus

No	Kecamatan	Perikanan laut		Perikanan Umum		Jumlah	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Wonosobo	677	677			677	677
3	Bandar Negeri						
4	Kota Agung	1 389	1 389			1 389	1 389
5	Pematang Sawa	949	951			949	951
6	Kota Agung Barat	416	416			416	416
7	Kota Agung Timur	236	236			236	236
8	Pulau Panggung						
9	Ulu Belu						
10	Air Naningan			131	131	131	131
11	Talang Padang						
12	Sumberejo						
13	Gisting						
14	Gunung Alip						
15	Pugung						
16	Bulok						
17	Cukuh Balak	589	590			589	590
18	Kelumbayan	740	741			740	741
19	Limau	702	703			702	703
20	Kelumbayan Barat		1				1
	Tanggamus	5 698	5 704	131	131	5 829	5 835

Produksi perikanan laut pada tahun 2017 di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 26.356,79 ton, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikanannya, Kabupaten Tanggamus merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak yaitu 10.721,98 ton.

Perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus terdiri dari perikanan budidaya tambak (202 rumah tangga), dan kolam (2.721 rumah tangga). Produksi perikanan budidaya tambak sebesar 2.482 ton, dan kolam 2.678 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak, dan kolam terdapat di kecamatan Pulau Panggung. Jumlah perahu di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor (245 perahu) perahu motor temple (1.329 perahu) dan kapal motor (750 perahu).

Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikanannya, Kabupaten Tanggamus merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak yaitu 10.721,98 ton.

Perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus terdiri dari perikanan budidaya tambak (202 rumah tangga), dan kolam (2.721 rumah tangga). Produksi perikanan budidaya tambak sebesar 2.482 ton, dan kolam 2.678 ton. Produksi perikanan budidaya tambak terbesar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak, dan kolam terdapat di kecamatan Pulau Panggung. Jumlah perahu di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor (245 perahu) perahu motor temple (1.329 perahu) dan kapal motor (750 perahu).

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Karakteristik responden

Karakteristik responden merupakan gambaran dari karakter serta nilai-nilai yang berkembang dari seorang individu yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain atau individu lainnya. Karakteristik responden dalam penelitian ini digambarkan dengan aspek umur, pendidikan, pengalaman usaha, pekerjaan sampingan, pendapatan utama, pendapatan sampingan, jumlah tanggungan. Secara rinci, penjelasan secara rinci tentang karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

5.1.1. Umur

Pengelompokkan umur menurut Mantra (2004) dikategorikan dalam tiga golongan rentang usia yaitu usia 0-14 tahun tergolong dalam kelompok kategori usia belum produktif, rentang usia 15-64 tahun tergolong dalam kelompok usia produktif dan rentang usia lebih dari 65 tahun termasuk dalam kategori tidak produktif. Berdasarkan hasil penelitian, sebaran responden atau nelayan di Pesisir Kabupaten Tanggamus secara yaitu disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran nelayan di Pesisir Kabupaten Tanggamus berdasarkan umur

Umur (Tahun)	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
Muda (25-38)	32	26,67
Dewasa (39-52)	60	50,00
Tua (53-66)	28	23,33
Modus	Dewasa	100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa sebesar 50 persen nelayan di pesisir Kabupaten Tanggamus yang bekerja sebagai nelayan berada pada rentang usia 39 hingga 52 tahun dan paling banyak masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus berusia 45 tahun. Menurut Mantra (2004), seseorang yang berada pada rentang usia 15-64 tahun berada pada kondisi produktif. Sehingga nelayan yang ada di pesisir Kabupaten berada pada kondisi produktif untuk melaksanakan usahanya yang dalam penelitian ini berkerja sebagai nelayan. Masyarakat pesisir

di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi yang baik untuk menyerap pengetahuan dan informasi baru yang berkaitan dengan usaha di bidang perikanan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus.

5.1.2. Pendidikan

Tingkat pendidikan petani akan mempengaruhi pola pikir dan kemampuan petani dalam menerima informasi, pengetahuan, inovasi serta teknologi baru yang bermanfaat untuk dapat mengembangkan usaha pertanian tembakau. Menurut Mosher (1965), pendidikan formal akan mempengaruhi kemampuan proses belajar, menerima pengetahuan, kecakapan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih cepat untuk mengambil dan menyerap suatu pengetahuan baru. Secara rinci sebaran responden berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 3 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Tingkat pendidikan nelayan di Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus

Tingkat pendidikan	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
SD	80	66,67
SMP	28	23,33
SMA/SMK	12	10,00
Modus	SD	100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat jika tingkat pendidikan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus sebagian besar baru menyelesaikan pendidikan sekolah dasar. Tingkat pendidikan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam menyerap pengetahuan maupun informasi tentang perkembangan teknologi dan inovasi dalam pengembangan usaha perikanan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan maupun pemberdayaan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Wantah (2017) jika tingkat

pendidikan menjadi kendala dalam program pemberdayaan nelayan di pesisir Kabupaten Minahasa Utara.

5.1.3. Pengalaman usaha

Pengalaman usaha berkaitan dengan lama waktu masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus melaksanakan kegiatan usaha di bidang perikanan. Lama pengalaman usaha nelayan mempengaruhi perilaku seseorang dalam menjalankan usahanya sehingga akan berpengaruh terhadap keberhasilan dalam menjalankan usaha dibidang perikanan. Secara rinci sebaran responden berdasarkan pengalaman usaha nelayan dalam menjalankan usahanya dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sebaran responden berdasarkan pengalaman usaha

Pengalaman Usaha (Tahun)	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
Baru (5-18)	40	33,33
Cukup lama (19-32)	56	46,67
Lama (33-46)	24	20,00
Modus	Cukup Lama	100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam Tabel 4, sebesar 46,67 persen masyarakat pesisir yang menjalankan usaha sebagai nelayan memiliki pengalaman usaha cukup lama yaitu berkisar antara 19 hingga 32 tahun. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh nelayan tersebut maka kemampuan teknis yang dimiliki oleh masyarakat pesisir ini cukup baik untuk menjalankan usahanya. Menurut Hasyim (2005), lama pengalaman seseorang dalam menjalankan suatu usaha akan mempengaruhi tingkat keterampilan orang tersebut dalam menjalankan usahanya.

5.1.4. Pekerjaan sampingan

Pekerjaan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai nelayan. Untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari masyarakat memiliki pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan bertujuan

untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi rumah tangga. Secara rinci sebaran responden berdasarkan pekerjaan sampingan masyarakat disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Sebaran responden berdasarkan pekerjaan sampingan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus

Pekerjaan sampingan	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
Tidak ada	68	56,67
Pedagang	40	33,33
Lainnya	12	10,00
Modus	Tidak ada	

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 5 menunjukkan jika masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus yang berprofesi sebagai nelayan tidak semua memiliki pekerjaan sampingan. Sebesar 56,67 persen nelayan di pesisir Kabupaten Tanggamus tidak memiliki pekerjaan sampingan sedangkan sebesar 33,33 persen memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang. Nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan yaitu bekerja sebagai pedagang ikan di pasar, membuka warung atau berjualan makanan. Sebesar 10 persen nelayan yang memiliki pekerjaan lain yaitu bekerja sebagai ojek nelayan, kaur pemerintahan desa dan guru honorer. Nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan hanya mengandalkan hasil dari mencari ikan di laut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Tingginya nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan berkaitan dengan tingkat pendidikan nelayan dan ketersediaan modal sehingga mereka merasa kesulitan untuk bisa beralih atau melakukan pekerjaan sampingan.

5.1.5. Pendapatan Utama

Masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus yang bekerja sebagai nelayan menggantungkan pendapatannya hanya pada hasil mencari ikan di laut. Pendapatan yang diperoleh digunakan untuk memeluhai kebutuhan sehari-hari seperti untuk pengeluaran pangan, pendidikan dan sosial. Secara rinci sebaran responden berdasarkan pendapatan utama yaitu disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Sebaran responden berdasarkan pendapatan utama masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus

Pendapatan Utama (Rp/Tahun)	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
Rendah (12 jt -< 28 jt)	108	90,00
Sedang (28 jt -< 44 jt)	8	6,67
Tinggi (44 jt - 60 jt)	4	3,33
Modus Rendah		100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Berdasarkan Tabel 6, diketahui sebagian besar masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus yang berkerja sebagai nelayan memiliki tingkat pendapatan sebesar 12 hingga 28 juta rupiah pertahun atau satu juta hingga 2,2 juta perbulan. Nelayan yang memiliki tingkat pendapatan tinggi merupakan seorang yang memiliki modal lebih besar sehingga dapat membeli kapal lebih besar yang digunakan untuk mencari ikan di laut. Dimusim yang tidak menentu ini akibat kondisi alam yang kurang baik untuk mencari ikan di laut, banyak nelayan yang tidak mencari ikan di laut sehingga terjadi penurunan pendapatan.

Rendahnya tingkat pendapatan nelayan tersebut berkaitan dengan tingkat pendidikan nelayan yang masih rendah dan modal yang terbatas sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan. Pendapatan yang rendah dapat dipengaruhi oleh penggunaan alat tangkap yang masih sederhana sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan.

5.1.6. Pendapatan Sampingan

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nelayan di Kabupaten Tanggamus memiliki pekerjaan sampingan. Hal tersebut dikarenakan jumlah pendapatan yang diterima dari hasil mencari ikan di laut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi dimana terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan pokok. Untuk itu, maka masyarakat dituntut untuk pandai memanfaatkan peluang yang ada untuk menambah penghasilan rumah tangga. Tidak semua nelayan di pesisir Kabupaten Tanggamus memiliki pekerjaan sampingan. Hal tersebut terkait dengan ketersediaan modal. Secara rinci tingkat

pendapatan sampingan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sebaran responden berdasarkan tingkat pendapatan sampingan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus

Pendapatan Sampingan (Rp/Tahun)	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=52)	Persentase (%)
Rendah (6 jt -< 14 jt)	40	76,92
Sedang (14 jt -< 22 jt)	4	7,69
Tinggi (22 jt - 30 jt)	8	15,38
Modus Rendah		100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Nelayan di Kabupaten Tanggamus untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang ikan dipasar, dagang makanan ringan, ojek nelayan, guru honorer maupun kaur di pemerintahan desa. Jumlah pendapatan yang mereka terima dari pekerjaan sampinga tersebut juga tidak terlalu besar atau masih tergolong rendah. Sebesar 76,92 persen nelayan menerima sejumlah pendapatan yang diterima oleh nelayang dari pekerjaan sampingan tersebut sebesar 6 juta hingga 14 juta rupiah pertahun atau 500 ribu hingga 1 juta rupiah perbulan.

Leokman (1987) menjelaskan bahwa nelayan tradisional dengan kehidupan tergantung kepada perairan laut, yang faktor cuaca memengaruhi hasil tangkapan atau hasil produksi ikan. Hal ini apabila cuaca baik maka hasil tangkapan akan meningkat, sebaliknya cuaca buruk akan tidak mencari ikan di laut.

5.1.7. Jumlah Tanggungan

Jumlah tanggungan keluarga merupakan banyaknya jumlah anggota keluarga yang sering dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menerima suatu inovasi dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah banyaknya anggota keluarga yang menjadi beban kepala keluarga dan masih berada dalam satu atap (Lubis, 2000). Secara rinci jumlah tanggungan keluarga nelayan atau masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Sebaran reponden berdasarkan jumlah tanggungan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanggamus

Jumlah Tanggungan (Orang)	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
Rendah (2-4)	56	46,67
Sedang (5-7)	52	43,33
Tinggi (8-10)	12	10,00
Modus	Rendah	100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Jumlah tanggungan keluarga nelayan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi jumlah tanggungan maka akan semakin besar beban yang di tanggung oleh kepala keluarga (Lubis, 2000). Tingginya tanggungan yang ditanggung oleh kepala keluarga maka akan berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan nelayan.

5.1.8. Pelatihan

Kegiatan pelatihan di berikan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan seseorang sehingga dapat mengembangkan usahanya menjadi lebih baik dan terjadi peningkatan kesejahteraan.

Kegiatan pelatihan memiliki peran penting untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta wawasan dalam penerapan teknologi dan inovasi baru. Sebaran responden berdasarkan keikutsertaan nelayan dalam kegiatan pelatihan disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Sebaran responden berdasarkan keikutsertaan nelayan dalam kegiatan pelatihan

Pelatihan	Kabupaten Tanggamus	
	Jumlah (Org) (n=120)	Persentase (%)
Tidak pernah	80	66,67
Jarang	24	20,00
Pernah	16	13,33
Modus	Tidak pernah	100,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui jika sebesar 66,67 persen nelayan di Kabupaten Tanggamus tidak pernah mengikuti kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan nelayan dalam mengadopsi teknologi serta informasi baru yang berkaitan dengan kegiatan usaha nelayan dalam mencari ikan di laut. Salah satu penyebab penurunan jumlah tangkapan nelayan yaitu adanya kerusakan sumberdaya laut sehingga jumlah ikan yang terdapat dilaut semakin berkurang. Penurunan jumlah ikan tersebut dapat disebabkan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan standar. Maka dari itu, kegiatan pelatihan dan pembinaan diperlukan untuk nelayan.

Kegiatan pelatihan yang diadakan harus sesuai dengan kebutuhan nelayan. Agar kegiatan pelatihan dan pembinaan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal. Beberapa materi penting yang diperlukan nelayan untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu sebagai berikut yang disajikan pada tabel 10.

Tabel 10. Materi pelatihan

No	Materi Pelatihan	Persentase (%)	
		Ya	Tidak
1	Aturan dalam penangkapan ikan	26,67	73,33
2	Pemasaran ikan atau hasil olahan	10,00	90,00
3	Kondisi perubahan iklim	-	100,00
4	Strategi terhadap iklim yang tidak menentu	-	100,00
5	Praktek bongkar pasang mesin kapal	-	100,00
6	Pelatihan budidaya ikan hias dan rumput laut	10,00	90,00

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Untuk mendukung kegiatan usaha disektor perikanan maka diperlukan beberapa meteri pendukung. Kegiatan pelatihan ini banyak diselenggarakan oleh Dinas Perikanan. Sebelum melakukan pelatihan hal penting yang harus dilakukan yaitu melakukan survei awal kepada nelayan untuk mencari tahu materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan nelayan agar pelatihan yang diberikan sesuai. Nelayan di pesisir Kabupaten Tanggamus hanya 26,67 persen yang pernah mengikuti pelatihan dan sepuluh persen mengikuti pelatihan tentang pemasaran ikan atau hasil olahan serta pelattihan tentang budidaya ikan hias dan rumput laut. Hanya sebagian kecil saja yang pernah mengikuti pelatihan. Padahal kegiatan

pelatihan ini penting untuk mengembangkan kemampuan serta pengetahuan nelayan.

Kegiatan mencari ikan di laut ini sangat bergantung pada kondisi alam. Jika kondisi alam kurang baik maka nelayan tidak dapat mencari ikan di laut. Sedangkan sebagian besar nelayan menggantungkan hidupnya hanya dari pendapatan mencari ikan di laut. Jika kondisi alam yang tidak mendukung untuk mencari ikan di laut maka banyak nelayan yang libur mencari ikan di laut dan menjadi pengangguran. Maka dari itu, pelatihan tentang strategi dan upaya yang dapat dilakukan nelayan untuk menghadapi perubahan iklim yang tidak menentu penting untuk diberikan kepada nelayan serta tata cara bagaimana memperbaiki mesin kapal. Beberapa materi penting tersebut belum pernah diberikan kepada nelayan. Padahal materi tersebut sangat penting mengingat saat ini kondisi alam yang sangat tidak menentu akibat adanya perubahan iklim. Dinas Perikanan perlu memperhatikan isu-isu terkini serta kebutuhan nelayan jika akan memberikan materi pelatihan kepada nelayan.

5.2. Model Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam kondisi sekarang sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan keterbelakangan. Proses pemberdayaan masyarakat menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya (Rahim, 2014).

Cook dan Macaulay (1997) mengemukakan bahwa pemberdayaan lebih memandang masyarakat sebagai subjek yang dapat melakukan perubahan dengan cara membebaskan seseorang dari kendala dan memberi orang atau masyarakat dengan kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-ide, keputusan, dan tindakannya. Di sisi lain pemberdayaan masyarakat adalah upaya membangun daya dengan cara mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian Bahrudin (2004) menunjukkan jika kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tiris Probolinggo dengan program pemberian modal usaha berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan serta program pemberdayaan masyarakat dengan pemberian modal usaha dan ketrampilan dapat mendorong usaha-usaha produktif guna meningkatkan pendapatan. Tahun 2007, Abibu melakukan penelitian yang hasilnya menyatakan jika pemberdayaan perempuan melalui penguatan ekonomi produktif dengan program pemberian modal usaha di Kabupaten Konawe dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat melalui pemberian kredit mikro berbasis simpan pinjam di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Huda, 2005).

Potensi yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Tanggamus yaitu hasil laut yang melimpah, potensi wisata pantai yang indah serta mayoritas penduduk yang mengandalkan hasil laut. Konsep pemberdayaan masyarakat yang menekankan pada penguatan serta peningkatan kemampuan masyarakat agar dapat berdaya, dan mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat harus mengacu pada peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Untuk itu, pemberdayaan masyarakat harus mampu membangunkan serta membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dilimikinya serta mengembangkannya untuk kemandirian masyarakat itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus merupakan upaya strategis yang sangat potensial dalam peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

5.3. Potensi Pemberdayaan Masyarakat

Model pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya pengenalan potensi yang ada di wilayah tersebut. Potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus yaitu hasil laut yang masih melimpah, kondisi pantai yang indah serta sebagian besar masyarakat mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Potensi di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus

No	Potensi
1	Hasil laut melimpah
2	Potensi wisata pantai
3	Mayoritas penduduk mengandalkan hasil laut
4	Usaha rumahan

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Hasil laut yang melimpah di daerah penelitian menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan, mengingat sebagian besar masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus mengandalkan hasil laut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Maka hal tersebut dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan dengan memanfaatkan potensi yang ada.

Model pemberdayaan yang dapat dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus yaitu dengan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada ekonomi. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Bahrudin (2004) bahwa dengan pemberian modal usaha berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan pada masyarakat miskin di Kecamatan Probolinggo serta pemberdayaan kaum perempuan melalui penguatan ekonomi produktif dengan program pemberian modal usaha di Kabupaten Konawe yang hasilnya dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Masyarakat di wilayah pesisir yang mengandalkan hasil laut sebagai sumber penghasilan utama rumah tangga sangat rentan terhadap kemiskinan, sebab kegiatan mencari ikan di laut sangat tergantung pada kondisi alam, jika kondisi alam yang tidak mendukung maka nelayan tidak dapat mencari ikan di laut sehingga mereka kehilangan sumber pendapatannya. Jika demikian maka akan semakin memperburuk kondisi perekonomian rumah tangga nelayan. Kaum perempuan yang di masyarakat pesisir dapat diberikan pelatihan untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada disekitar tempat tinggal. Para kaum perempuan dapat diberikan pelatihan untuk pengolahan hasil laut agar memiliki harga jual lebih tinggi. Konsep ekonomi kreatif dapat dikembangkan dikalangan para ibu-ibu seperti pembuatan pelet ikan, pengolahan hasil laut serta pembuatan kerajinan dari hasil laut.

}²
=

✓
Kurd
(1)

5.4. Strategi Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir

Strategi yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan dan pembinaan pengolahan ikan

Hal tersebut mengacu pada potensi sumber daya laut yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus masih melimpah. Serta sebagian besar masyarakat yang hanya mengandalkan hasil mencari ikan di laut sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus belum banyak berkembang usaha pengolahan hasil laut. Banyak ibu rumah tangga yang menganggur. Dengan adanya pelatihan serta pembinaan yang ditujukan kepada kaum perempuan maka diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi yang ada disekitar. Hasil laut dapat diolah menjadi beberapa produk turunan yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

2. Peningkatan modal

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan yaitu adanya keterbatasan modal. Untuk dapat mengembangkan suatu kegiatan atau usaha dibutuhkan adanya modal. Selama ini, masih banyaknya nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil mencari ikan di laut dikarenakan nelayan tidak memiliki cukup modal untuk bisa mengembangkan usaha lain. Penguatan ketersediaan modal bagi nelayan dapat dikembangkan melalui penguatan lembaga keuangan mikro dikalangan nelayan melalui usaha simpan pinjam berbasis masyarakat seperti yang dikembangkan di Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar (Huda, 2005).

3. Peningkatan pengawasan oleh pemerintah melalui dinas

Telah banyak program yang diberikan kepada masyarakat pesisir untuk mendorong peningkatan pendapatan melalui bantuan penguatan usaha seperti bantuan kapal dan alat tangkap serta beberapa bantuan finansial lainnya. Tetapi adanya program ini belum dapat dirasakan oleh semua masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Menurut penuturan beberapa nelayan, bantuan yang diterima oleh nelayan baru dinikmati oleh ketua kelompok nelayan, anggota kelompok yang terdiri atas keluarga tertentu,

serta ada yang melakukan jual beli atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk itu, perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait atas pemberian bantuan agar pemberian bantuan dapat tepat sasaran sesuai dengan tujuan pemberian bantuan yaitu untuk membantu meningkatkan pendapatan nelayan.

4. Peningkatan pendidikan remaja nelayan

Tingkat pendapatan rumah tangga nelayan yang rendah dan jumlah tanggungan kepala keluarga yang tinggi menyebabkan banyak anak nelayan yang tidak mampu mendapatkan pendidikan yang layak. Jumlah pendapatan rumah tangga yang tidak mencukupi memaksa para nelayan tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi kepada anaknya. Tingkat pendidikan berkaitan dengan rendahnya tingkat kapasitas masyarakat dalam mengelola sumberdaya sehingga produktivitas masyarakat menjadi rendah. Tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab semakin buruknya tingkat kemiskinan. Untuk dapat membantu keberhasilan program pemberdayaan masyarakat maka diperlukannya peningkatan tingkat pendidikan bagi masyarakat khususnya pada masyarakat remaja.

5. Penguatan kelembagaan

Lembaga pemberdayaan masyarakat memiliki peranan menampung aspirasi tentang rancangan pembangunan di desa maupun kelurahan serta ikut memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan yang ada di tingkat desa maupun tingkat kelurahan. Tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif, menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong rotong dan swadaya masyarakat, menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Untuk itu lembaga pemberdayaan masyarakat ini perlu dikembangkan untuk membangun kesadaran masyarakat dan sebagai wadah untuk mengembangkan ide.

Salah satu lembaga yang dikembangkan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB). Dalam KUB ini

berkembang beberapa beberapa program serta bantuan yang diperuntukkan kepada nelayan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan nelayan. Melalui kelompok inilah beberapa program dari pemerintah disalurkan. Pelatihan pengolahan hasil laut juga menjadi salah satu program yang dilaksanakan oleh kelompok ini. Program serta kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok tersebut antara lain yaitu disajikan pada Tabel 12

Tabel 12. Program-Program Kelompok Usaha Bersama Kabupaten Tanggamus selama 4 tahun terakhir

No	Nama Pekerjaan	Volume
Tahun 2015		
1	Pengadaan Cold Box (Dak & Sharing)	100 Unit
2	Pembuatan Kapal Motor Ketinting (DAK & Sharing)	15 Unit
3	Pengadaan Gill Nett (DAK & Sharing)	11 Unit
4	Pengadaan Jaring Rampus (DAK & Sharing)	60 Unit
5	Pengadaan Pancing Rawai Dasar (Dak & Sharing)	58 Unit
Tahun 2016		
1.	Kapal Motor Ketinting	6 Unit
2	Pancing Rawe	26 Unit
3	Bantuan Premi Asuransi Nelayan	867 nelayan
Tahun 2017		
1.	Kapal 10 GT	1 Unit
2.	Kapal Penangkap Ikan Besrta Mesin dan Alat Tangkapmya	5 Unit
3.	Bantuan Premi asuransi Nelayan	1486 nelayan
Tahun 2018		
1.	Pengadaan Jaring Gill Nett	22 Piaces
2.	Pengadaan Jaring Rampus	110 Piaces
3.	Pengadaan Pancing	13 Unit
4.	Bantuan Premi asuransi Nelayan	190 nelayan

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2019.

Program yang dilaksanakan oleh KUB dinilai oleh nelayan belu mampu mewakili kebutuhan penting nelayan dalam upaya pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari persepsi nelayan terhadap pelaksanaan program KUB. Penilaian nelayan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan KUB yaitu disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Penilaian nelayan terhadap program KUB

No	Penilaian terhadap program KUB	Persentase		
		Kurang (%)	Cukup (%)	Baik (%)
1	Perencanaan program sesuai dengan kebutuhan	0	13,33	86,67
2	Perencanaan program melibatkan seluruh anggota kelompok	16,67	83,33	0
3	Pelaksanaan program sesuai dengan rencana	26,67	60,00	13,33
4	Tujuan program tercapai	76,67	16,67	6,67
5	Memberikan manfaat bagi kelompok	3,33	93,33	3,33
6	Evaluasi program telah dilakukan oleh dinas terkait	93,33	6,67	0

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Dalam perencanaan program yang dilakukan oleh KUB di laksanakan baik tetapi tidak terlalu melibatkan anggota kelompok dalam perencanaan program. Artinya program di susun oleh ketua kelompok dan beberapa orang anggota. Pelaksanaan program cukup sesuai dengan rencana dan cukup memberikan manfaat untuk kelompok tetapi tujuan KUB yaitu membantu dalam pengentasan kemiskinan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan kurang baik serta evaluasi terhadap program yang telah dilakukan tidak dilakukan oleh dinas terkait yang bekerja sama dengan KUB.

Program yang dilaksanakan oleh KUB merupakan program kerjasama antara Dinas Perikanan dan KUB serta beberapa instansi lain. Program bantuan yang dialokasikan kepada nelayan diberikan pada kelompok-kelompok kecil. Agar program bantuan dapat sampai kepada nelayan dan tepat sasaran maka data kelompok dikordinasikan melalui KUB dengan tujuan agar bantuan yang diberikan dapat diterima oleh nelayan sesuai dengan sasaran dan agar pemberian bantuan dapat diterima secara merata dan adil oleh nelayan serta tidak ada kelompok yang mendapatkan bantuan dua kali sedangkan masih terdapat kelompok lain atau nelayan lain yang belum dapat. Namun dalam berjalannya program tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh KUB dalam

menjalankan programnya. Kendala yang dihadapi oleh KUB disajikan dalam Tabel 14.

Tabel 14. Kendala KUB di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus

No	Kendala KUB
1	Ketua ingin berkuasa sendiri atas bantuan yang didapatkan
2	Anggota kelompok berisikan anggota keluarga ketua kelompok
3	Sulitnya kerjasama antar anggota kelompok
4	Sering terjadi beda pendapat antar anggota sehingga sering terjadi perselisihan antar anggota
5	Proposal sulit di ACC
6	Bantuan yang diperoleh diperjual belikan
7	Bantuan yang diberikan tidak bertahan lama
8	Perlu adanya pembinaan pemanfaatan bantuan
9	Perlu adanya tinjauan dari pemerintah atau dinas terkait

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Kendala yang dihadapi oleh KUB harus dapat diselesaikan secara bijak. Sebab KUB inilah yang seharusnya menjadi wadah bagi para nelayan untuk membangun program pemberdayaan untuk mengentaskan masalah kemiskinan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Beberapa saran yang diberikan oleh nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi di dalam KUB adalah sebagai berikut yang tersaji pada Tabel 15.

Tabel 15. Saran Perbaikan Sarana Nelayan Melalui KUB

No	Saran perbaikan KUB
1	Bantuan diberikan secara perseorangan
2	Adanya monitoring dari pemerintah melalui dinas terkait atas program yang dilaksanakan
3	Perlu adanya pembinaan dan pelatihan untuk masyarakat
4	Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai
5	Bantuan dalam bentuk modal
6	Peningkatan kerjasama antar anggota kelompok
7	Harus ada tinjauan langsung oleh dinas agar bantuan tepat sasaran

Sumber: Data primer, diolah 2019.

5.4.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat nelayan di Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus

Setiap pelaksanaan kegiatan sudah pasti mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor penghambat atau faktor pendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus.

Faktor yang dianggap mempengaruhi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu diidentifikasi sebagai variabel X yang meliputi umur (X1), pendapatan (X2), pengalaman usaha (X3), pendidikan (X4), dan pelatihan (X5), sedangkan variabel yang dipengaruhinya adalah penilaian nelayan terhadap kinerja program KUB (Y) di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Analisis pengaruh di antar variabel di analisis dengan menggunakan analisis regresi. Hasil pengujian regresi dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Hasil analisis regresi linier berganda antara variabel X dan Y

No	Variabel X	Variabel Y	B	Sig
1	Konstanta		24,033	0,176
2	Umur		0,059	0,910
3	Pendapatan	Pemberdayaan	$4,69 \cdot 10^{-7}$	0,117
4	Pengalaman usaha	masyarakat	-0,239	0,656
5	Pendidikan		0,192	0,871
6	Pelatihan		5,629*	0,090

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Keterangan:

sig : signifikan

* : nyata pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$)

Berdasarkan Tabel 16. Dapat diketahui jika faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai berdasarkan penilaian tentang keberhasilan pelaksanaan program dalam Kelompok Usaha Bersama. Program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh KUB dianggap sebagai gambaran tentang pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Tanggamus.

Berdasarkan hasil analisis pengaruh maka diketahui jika faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus yaitu kegiatan pelatihan yang diterima oleh nelayan.

Kegiatan pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap program kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus. Hal ini menunjukkan jika semakin sering nelayan mengikuti kegiatan pelatihan maka akan semakin tinggi kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk membangun kemandirian nelayan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan dipengaruhi oleh kegiatan pelatihan yang diterima. Selama ini, nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagian besar belum menerima kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Kegiatan pelatihan yang diterima nelayan baru dirasakan hanya oleh beberapa nelayan saja. Kegiatan pelatihan dan pembinaan ini memiliki peran penting dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan. Hal tersebut berkaitan dengan peningkatan kemampuan nelayan dalam menjalankan usahanya. Tingkat pendidikan nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus yang masih pada kategori rendah ini memiliki peran penting dalam penentuan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan nelayan dalam usaha perikanan yaitu dengan pendidikan nonformal yang dalam hal ini diterima dalam bentuk pelatihan dan pembinaan.

Selain itu, masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus yang menjadikan kegiatan mencari ikan di laut sebagai sumber pendapatan utama rumah tangga sangat rentan terhadap kemiskinan. Kegiatan pelatihan yang dibutuhkan nelayan yaitu pelatihan dalam memanfaatkan potensi yang ada di sekitar melalui program ekonomi produktif. Salah satu materi pelatihan yang dibutuhkan oleh nelayan yaitu pengolahan hasil laut menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Selain itu, masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sampingan dan hanya mengandalkan usaha mencari ikan di laut akan menjadi pengangguran jika keadaan alam tidak menentu akibat perubahan iklim seperti saat ini. Nelayan bisa tidak dapat mencari ikan di laut hingga satu bulan lamanya. Jika hal tersebut terjadi maka nelayan akan kehilangan sumber

pendapatannya. Maka dari itu, nelayan sangat memerlukan kegiatan pelatihan dan pembinaan.

Sumberdaya laut yang masih melimpah menjadi faktor pendukung potensial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hanya perlu kegiatan pelatihan untuk membangun kesadaran dan motivasi nelayan untuk dapat berdaya dan mandiri. Nelayan terhambat oleh tingkat kemampuan teknis yang masih rendah dan ketersediaan modal. Selain itu, model pendampingan kelompok miskin mutlak dilakukan dalam memperbaiki budaya usaha, memotivasi keluarga dalam pengelolaan keuangan. Pemberdayaan masyarakat dengan pengembangan sumber ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan kelembagaan (Rahim, 2014).

5.5. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus

Dalam menjalankan suatu kegiatan atau program sudah pasti terdapat kendala yang akan dihadapi. Begitu juga dengan program pemberdayaan yang berbasis pada peningkatan ekonomi produktif di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus mengalami beberapa kendala. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan program pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Kendala dalam pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus

No	Kendala pemberdayaan masyarakat
1	Keterbatasan modal
2	Keadaan iklim yang tidak menentu
3	Penghasilan rendah
4	Bantuan hanya dirasakan oleh sebagian orang tertentu
5	Tingkat sumberdaya manusia yang rendah

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Keterbatasan modal menjadi kendala utama dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan terbatasnya modal maka nelayan hanya mengandalkan hasil mencari ikan di laut sehingga penghasilan yang diterima nelayan juga rendah. Hal tersebut akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kualitas sumberdaya

manusia. Bantuan yang diterima dari dinas terkait juga tidak dapat dirasakan secara merata oleh nelayan. Hal tersebut dikarenakan yang menerima bantuan hanya orang-orang tertentu dan yang dapat memanfaatkan juga hanya orang-orang tertentu.

Pekerjaan nelayan sangat bergantung pada kondisi alam seperti perubahan cuaca di laut atau kegiatan mencari ikan di laut nelayan tergantung pada musim, jika musim baik maka pendapatan nelayan akan tinggi dan tingkat kesejahteraan lebih baik tetapi jika musim tidak baik maka nelayan tidak dapat mencari ikan di laut sehingga nelayan akan kehilangan sumber pendapatannya yang berpengaruh terhadap penurunan kesejahteraan rumah tangga. Selama ini nelayan belum dapat berbuat apa-apa untuk menanggulangi kondisi alam yang tidak menentu ini. Hal-hal yang biasa dilakukan oleh nelayan untuk mempertahankan usahanya yaitu sebagai mana disajikan dalam Tabel 18.

Tabel 18. Cara yang dilakukan nelayan di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus dalam mempertahankan usaha

No	Cara mempertahankan usaha dalam kondisi iklim tidak menentu
1	Membuat usaha lain untuk menutupi kebutuhan hidup seperti berdagang makanan disekitaran pantai dan ojek nelayan
2	Ibu-ibu membuat usaha rumahan pengolahan hasil laut
3	Budidaya rumput laut
4	Berjualan ikan dari dari nelayan lain di pasar
5	Tidak mencari ikan di laut sampai kondisi iklim memungkinkan

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Beberapa upaya dilakukan oleh nelayan dalam mempertahankan usahanya. Ada beberapa nelayan yang memiliki modal dan pengetahuan dalam pengelolaan hasil laut dengan berjualan tetapi ada juga yang membuat usaha rumahan pengolahan hasil laut. Sedangkan nelayan yang tidak memiliki modal tidak bisa mengembangkan atau beralih ke usaha lain. Sebagian besar nelayan pada saat kondisi alam tidak baik akan libur mencari ikan di laut hingga kondisi alam membaik dan memungkinkan untuk nelayan melakukan kegiatan mencari ikan di laut kembali. Menurut nelayan gejala perubahan iklim ditunjukkan sebagaimana disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Gejala perubahan iklim di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus

No	Gejala perubahan iklim	Persentase		
		Salah (%)	Ragu-ragu (%)	Benar (%)
1	Tinggi gelombang	-	-	100,00
2	Kecepatan angin	-	-	100,00
3	Intensitas curah hujan tinggi	30,00	66,67	3,33
4	Pola cuaca yang tidak menentu	-	10,00	90,00
5	Hasil tangkapan menurun	3,33	86,67	6,67
6	Perlu usaha sampingan	-	86,67	13,33

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Kondisi perubahan iklim oleh nelayan ditandai dengan adanya beberapa gejala. Gejala yang paling terlihat adanya kondisi perubahan iklim yaitu tingginya gelombang air laut, kecepatan angin tinggi, serta pola cuaca yang tidak menentu, sedangkan gejala intensitas curah hujan tinggi, hasil tangkapan yang menurun dan perlu usaha sampingan bukan merupakan gejala adanya perubahan iklim di wilayah pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus. Pada saat kondisi alam tidak menentu ini maka banyak nelayan yang tidak melakukan aktivitasnya dalam melaut. Hal hal yang diperlukan oleh nelayan pada saat seperti ini yaitu sebagaimana disajikan dalam Tabel 20.

Tabel 20. Hal-hal yang dibutuhkan oleh nelayan dalam kondisi iklim tidak menentu di Kabupaten Tanggamus Kabupaten Tanggamus

No	Hal-hal yang dibutuhkan oleh nelayan dalam kondisi iklim tidak menentu
1	Bantuan modal usaha
2	Bantuan sembako
3	Bantuan alat tangkap
4	Perbaikan peralatan
5	Jaminan kesehatan

Sumber: Data primer, diolah 2019.

5.6 Kesesuaian dan Keberhasilan Program Bidang Perikanan Tangkap di Kabupaten Tanggamus

Penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian program pada perikanan tangkap melalui aspek *context*, aspek *input*, aspek *process*, dan aspek *product*. Kesesuaian dan keberhasilan program dilihat dari persepsi dan penilaian responden penelitian. Evaluasi program bidang perikanan tangkap ditampilkan pada Tabel 21.

Tabel 21 Evaluasi program bidang perikanan tangkap di Kabupaten Tanggamus

Komponen Penilaian	Persentase	Nilai
I. Context		
a. Kesesuaian program dengan masalah		
b. Program sesuai dengan kebutuhan	73.1	Tinggi
c. Memecahkan persoalan		
II. Input		
a. Jumlah penyuluh/tenaga pendamping		
b. Kemampuan penyuluh/tenaga pendamping	71.7	Tinggi
c. Sarana prasarana		
d. Dana		
III. Proses		
a. Kegiatan sosialisasi		
b. Pendampingan	70.9	Tinggi
c. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan		
IV. Product		
a. Tercapainya tujuan		
b. Terpenuhinya kebutuhan	70.0	Tinggi
c. Peningkatan pendapatari		

Sumber: Data primer, diolah 2019.

Aspek *Context* memiliki persentase baik di atas 60 persen, hal ini karena program yang dilaksanakan di lapang sudah sesuai seperti kegiatan pembinaan pada kelompok nelayan terutama dalam memberikan solusi terhadap permasalahan nelayan, antara lain memberikan bantuan alat jaring yang ramah lingkungan, bantuan kapal kapal 5 GT kepada kelompok nelayan dengan adanya bantuan akan menjalin kerjasama kelompok yang lebih baik, pemberian asuransi kepada nelayan agar nelayan mendapatkan jaminan keselamatan saat melaut.

Aspek *Input* sudah baik namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Ketersediaan dana sudah ada baik dari APBD maupun APBN, selain itu program yang disampaikan sudah sesuai dengan perencanaan, sudah tersedia tempat nelayan berkumpul, seperti kantor TPI. Sumber Daya penyuluh pendampingan disediakan dengan syarat ketentuan minimal pendidikan lulusan sarjana, pelatihan diadakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola KUB dan penyuluh pendamping, namun tidak semua pengelola KUB mengikuti pelatihan.

Aspek *process* menunjukkan sudah baik, hal ini terlihat dengan kegiatan sosialisasi setiap program yang akan dilaksanakan, kemudian kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh sudah baik, hal ini dilihat fakta di lapang penyuluh perikanan menjadi fasilitator antara penyuluh dengan

dinas/lembaga lainnya. Penyaluran bantuan jaring tangkap dan bantuan kapal 5 GT diberikan kepada pihak desa untuk dapat digunakan oleh KUB nelayan, sedangkan kartu asuransi nelayan diberikan kepada individu nelayan. Pada jadwal pertemuan bersama nelayan biasanya diatur mengikuti waktu nelayan sehingga mereka dapat bertemu tepat waktu, pada saat pertemuan biasanya nelayan mengungkapkan segala masalah dan kebutuhannya, kemudian penyuluh dan pihak dinas akan merealisasikan dalam bentuk program.

Pada aspek *product*, kegiatan pembinaan pada kelompok memberikan dampak yang cukup baik dalam peningkatan hasil tangkapan. Bantuan jaring tangkap, kapal akan mengakibatkan produktivitas nelayan menjadi lebih besar, karena nelayan telah memiliki sarana yang dibutuhkan agar mampu memperluas area tangkapan. Peningkatan produktivitas nelayan akan berakibat pendapatan nelayan juga meningkat.

Tujuan program pengembangan perikanan tangkap adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan berbasis pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan, dengan sasaran peningkatan produksi perikanan tangkap (volume dan nilai), meningkatkan pendapatan nelayan, peningkatan nilai tukar nelayan, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah : (a) pengelolaan sumber daya ikan; (b) Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawasan kapal ikan tangkap; (c) pengembangan prasarana/fasilitas pelabuhan perikanan; (d) pengelolaan dan operasional pelabuhan perikanan; (e) pelabuhan usaha perikanan tangkap yang efisien, tertib dan berkelanjutan; dan (f) pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil wanita/nelayan. Program bidang perikanan tangkap pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanggamus memiliki antara lain: (a) sosialisasi tentang Kartu Asuransi Nelayan; (b) kegiatan ini memiliki tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada nelayan manfaat asuransi, sasaran dalam kegiatan ini adalah nelayan sepanjang pesisir; (c) menginput rumah tangga perikanan nelayan, kegiatan ini bertujuan agar semua rumah tangga nelayan dapat terdata secara lengkap; (d) pemberian bantuan lima unit kapal dan 10 set alat tangkap jaring, bantuan ini diberikan kepada kelompok nelayan; (e) gerakan bersih pantai,

asarannya adalah masyarakat pesisir dan para pelajar; dan (f) pembagian 5.000 kartu asuransi nelayan.

3.7 Program dan Bantuan pada Kelompok Usaha Bersama

Program KUB yang telah berjalan di kecamatan Kotaagung Sejak tahun 2002. Bantuan dari program-program KUB yang telah diberikan yang meliputi bantuan kapal besar, kapal kecil, piber dan alat tangkap (jaring bloon, jaring nilon, jaring rampus dan pancing). Bantuan yang diberikan nelayan secara umum telah sesuai dengan kebutuhan, tetapi pada saat bantuan telah diserahkan kepada kelompok-kelompok terdapat banyak permasalahan seperti ketua/pimpinan kelompok yang ingin menguasai bantuan yang diberikan. Tidak solidnya KUB karena umumnya dibentuk secara mendadak dan terpaksa yang anggotanya didominasi anggota keluarga dan kerabat dekat, sehingga seringkali penyaluran bantuan tidak tepat dan merata.

Masyarakat berharap agar bantuan diberikan kepada perorangan saja karena seringkali bantuan yang diperoleh melalui KUB menyebabkan sering terjadi selisih paham antar anggota kelompok. Perselisihan antar anggota KUB sulit dihindari karena didukung rendahnya intensitas petugas dari dinas terkait melakukan survey terkait pemanfaatan alat apakah dimanfaatkan dengan baik dan digunakan untuk kelompok atau untuk kepentingan individu. Usia bantuan yang diberikan melalui KUB umumnya tidak bertahan lama, umumnya bantuan perahu dan kapal dari KUB hanya difungsikan selama satu tahun dan kemudian dijual dan hasil penjualan dibagikan kepada oknum anggota KUB.

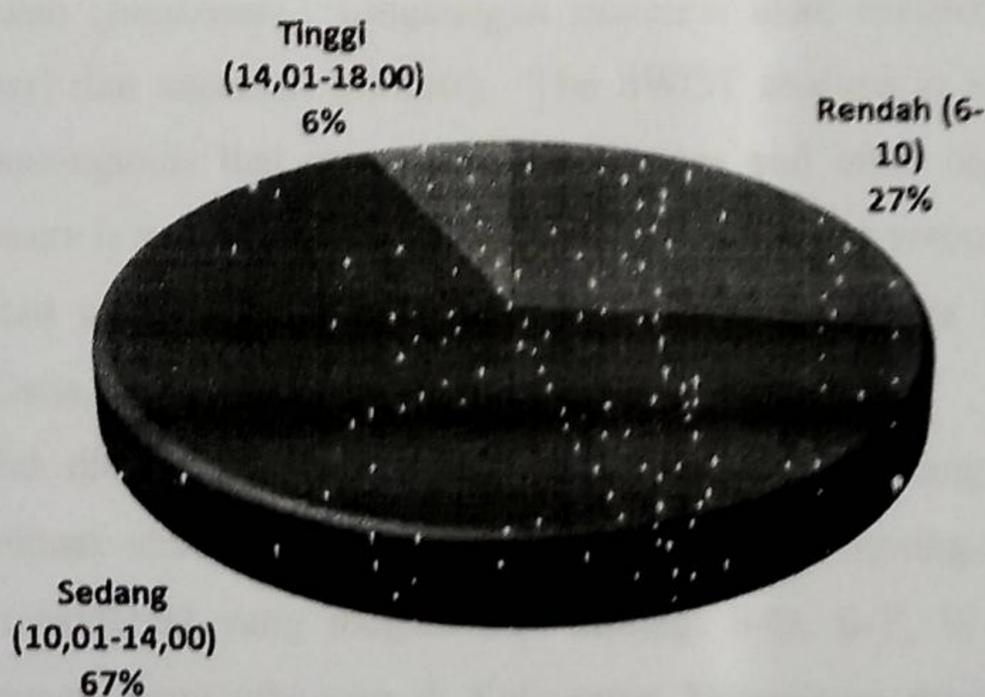
3.8 Keterlibatan Masyarakat dan Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dilihat aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Dari aspek perencanaan, sebagian besar nelayan sudah dilibatkan, hal ini terlihat dari kesesuaian bantuan/program dengan kebutuhan nelayan. Dari aspek pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi masih jauh dari kata sesuai.

Pihak-pihak yang memperoleh bantuan bukan masyarakat yang secara ekonomi membutuhkan tetapi pihak yang memiliki kedudukan/kekuatan dalam masyarakat. Padahal bantuan seharusnya diprioritaskan bagi anggota kelompok

yang membutuhkan dan secara ekonomi memiliki keterbatasan. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kepuasan anggota masyarakat terhadap keberhasilan program KUB.

Rendahnya keberhasilan program KUB disebabkan bantuan yang diterima oleh kelompok belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh anggota, tetapi didominasi oleh sebagian individu saja. Selain itu, rendahnya keberhasilan program KUB disebabkan rendahnya kerjasama antar anggota kelompok yang disebabkan kurangnya komunikasi antar anggota sehingga sering terjadi perselisihan. Selanjutnya, kegagalan program disebabkan adanya praktek kolusi dalam pendistribusian bantuan. Penilaian responden terhadap keberhasilan program KUB ditampilkan dalam Gambar 3.



Sumber: Data primer diolah (2019)

Gambar 3. Keberhasilan implementasi program KUB di Kabupaten Tanggamus

Melalui Gambar 3 diperoleh informasi bahwa sebagian besar masyarakat menilai bahwa efisiensi dan keberhasilan program KUB sedang sebesar 67 persen, kemudian kategori keberhasilan rendah sebesar 27 persen, dan masyarakat yang menilai program KUB telah sangat berhasil sebanyak 6 persen. Banyaknya masyarakat yang menilai program KUB kurang berhasil disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi para anggota terutama terkait keadilan dan

transparansi bantuan dalam program KUB. Banyak responden yang tidak puas dalam pengelolaan bantuan dalam program KUB.

3.9 Strategi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Melalui Kelompok Usaha Bersama

Pengelolaan sumberdaya pesisir tidak terlepas dari berbagai kendala, untuk meminimalisir kendala tersebut perlu adanya strategi dalam pengelolaan sumberdaya pesisir. Pengelolaan sumberdaya pesisir di Kabupaten Tanggamus secara umum dipengaruhi oleh lingkungan baik lingkungan internal maupun eksternal. Faktor lingkungan dapat menentukan tingkat keberhasilan pemanfaatan dan pengembangannya.

Lingkungan internal secara sinergis akan menentukan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Lingkungan eksternal akan menentukan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). The SWOT analysis is one of several strategic planning tools that are used by businesses and other organizations to ensure that there is a clear objective defined for the project or venture, and that all factors related to the effort, both positive and negative, are identified and addressed (Osita, Onyebuchi, Justina, 2014).

Setelah diidentifikasi aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman kemudian dibuat strategi yang berasal dari perkalian masing-masing faktor internal dan eksternal yang menghasilkan strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T. Rencana strategis pengembangan di Kabupaten Tanggamus ditampilkan dalam Matrik SWOT pada Tabel 22.

Dari Tabel 22 teridentifikasi Strategi S-O dalam pengembangan wilayah pesisir berkelanjutan meliputi: 1) Pengembangan usaha perikanan, 2) Pemeliharaan ekosistem laut, 3) Pelatihan peningkatan produk-produk hasil olahan. Strategi unggulan S-W meliputi : 1) Meningkatkan produk-produk hasil olahan, 2) Penegakkan hukuman terhadap perusak ekosistem laut, 3) Menjaga dan melestarikan potensi pantai untuk kegiatan wisata bahari. Strategi unggulan W-O meliputi: 1) Pelatihan produk-produk hasil olahan ikan, 2) Pelatihan kepada masyarakat pesisir pantai tentang pelestarian laut dan lingkungan pesisir pantai, 3) Pembinaan kepada masyarakat terkait kewirausahaan. Strategi unggulan W-T meliputi : 1) Membatasi produk perikanan dari luar daerah, 2) Meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut dan lingkungan, 3) Menjalinkan kerjasama dengan seluruh stakeholders meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir terhadap dunia usaha.

Tabel 22. Matriks SWOT pengembangan wilayah pesisir di Kabupaten Tanggamus

<p>Eksternal</p> <p>Internal</p>	<p>Opportunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laut yang luas 2. Jumlah ikan yang banyak 3. Kebutuhan ikan yang tinggi 4. Permintaan produk-produk turunan yang meningkat 	<p>Threats (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masuknya produk perikanan dari luar daerah 2. Eksploitasi ekosistem laut 3. Persaingan wisata bahari yang semakin ketat
<p>Strengths (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi ikan 2. Potensi ekosistem laut yang baik 3. Memiliki wisata bahari yang sangat menarik 4. Lingkungan sekitar pantai yang indah 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan usaha perikanan 2. Pemeliharaan ekosistem laut 3. Pelatihan peningkatan produk-produk hasil olahan laut 4. Pelatihan peningkatan jasa wisata bahari 5. Pemeliharaan lingkungan sekitar pantai/laut. 	<p>Strategi S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produk-produk hasil olahan 2. Penegakkan hukuman terhadap perusak ekosistem laut 3. Menjaga dan melestarikan potensi pantai untuk kegiatan wisata bahari
<p>Weakness (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil olahan produk-produk perikanan masih rendah/sedikit 2. Rendahnya kualitas masyarakat dalam pengelolaan ekosistem laut 3. Rendahnya pendapatan masyarakat pesisir pantai, karena tidak ada usaha sampingan 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan produk-produk hasil olahan ikan 2. Pelatihan kepada masyarakat pesisir pantai tentang pelestarian laut dan lingkungan pesisir pantai 3. Pembinaan kepada masyarakat terkait kewirausahaan 	<p>Strategi W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membatasi produk perikanan dari luar daerah 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut dan lingkungan 3. Menjalinkan kerjasama dengan seluruh stakeholders meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir terhadap dunia usaha

5.10 Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Kusnadi (2009) pemberdayaan masyarakat nelayan diartikan sebagai usaha-usaha sadar yang bersifat terencana, sistematis, dan berkesinambungan untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik

masyarakat nelayan dengan mengelola potensi sumberdaya yang mereka miliki untuk mencapai kesejahteraan sosial yang bersifat berkelanjutan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat pesisir, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat pesisir, di antaranya adalah:

- a. Strategi Fasilitasi, yaitu mengharapkan kelompok yang menjadi sasaran program sadar terhadap pilihan-pilihan dan sumberdaya yang dimiliki. Strategi ini dikenal sebagai strategi kooperatif, yaitu agen peubah secara bersama-sama dengan kliennya (masyarakat) mencari penyelesaian.
- b. Strategi edukatif, yaitu strategi yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian terhadap segmen yang akan diberdayakan.
- c. Strategi persuasive, yaitu strategi yang ditujukan untuk membawa perubahan melalui kebiasaan dalam berperilaku. Strategi ini lebih cocok digunakan bila target tidak sadar terhadap kebutuhan perubahan atau mempunyai komitmen yang rendah terhadap perubahan.
- d. Strategi kekuasaan, yaitu strategi yang efektif membutuhkan agen peubah yang mempunyai sumber-sumber untuk memberi bonus atau sanksi pada target serta mempunyai kemampuan untuk monopolis akses. Untuk terlaksananya strategi-strategi tersebut, program unggulan harus dibuat dan dilaksanakan secara terstruktur dan terencana dengan komitmen yang kuat (Latif, 1999).
- e. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka konsep pemberdayaan masyarakat yang dapat dikembangkan di wilayah pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu pemberdayaan yang berbasis pada masyarakat dan penguatan ekonomi produktif bagi kaum perempuan. Hal tersebut mengingat potensi yang ada di wilayah pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus yang masih melimpah tetapi masyarakat terkendala dengan ketersediaan modal dan kemampuan kompetensi sumberdaya manusia di wilayah tersebut yang masih rendah. Selain itu, masyarakat belum dapat menangani aspek perubahan kondisi alam yang terjadi.
- f. Program-program pelatihan juga masih minim diterima oleh nelayan di wilayah tersebut. Maka dari itu, untuk mengembangkan pemberdayaan

masyarakat di Pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus konsep pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas atau masyarakat dengan dengan strategi fasilitasi dan edukatif cocok untuk diterapkan di wilayah ini.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Model pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu model pemberdayaan masyarakat berbasis penguatan ekonomi produktif dan pengembangan pelatihan serta pembinaan bagi nelayan melalui Kelompok Usaha Bersama. Program perikanan tangkap secara umum sudah baik, kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan. Namun dalam implementasi kegiatan dan program pada KUB masih perlu ditingkatkan, karena bantuan program masih dirasakan oleh sebagian individu saja yang disebabkan rendahnya komunikasi antar anggota kelompok akibat pemahaman terhadap kebutuhan kelompok yang masih rendah. Evaluasi terhadap keberhasilan program KUB masyarakat menilai bahwa keberhasilannya masih rendah. Sedikit masyarakat yang merasa puas atas keberhasilan implementasi program KUB. Banyaknya masyarakat yang menilai kurang berhasil terhadap program KUB disebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi para anggota terutama terkait keadilan dan transparansi bantuan dalam program KUB. Dari kondisi ini, maka perlu pendampingan terhadap kelompok untuk meningkatkan keberhasilan program KUB di Kabupaten Tanggamus.
2. Potensi yang ada di Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu sumberdaya laut yang masih melimpah, potensi wisata pantai yang indah serta mayoritas penduduk yang mengandalkan hasil laut dan faktor pendukung yang berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat yaitu pelatihan dan pembinaan nelayan.
3. Kendala yang dihadapi oleh nelayan di pesisir Teluk Semaka Kabupaten Tanggamus yaitu keterbatasan ketersediaan modal, kualitas sumberdaya manusia yang rendah, penghasilan rendah, kondisi iklim yang tidak menentu serta bantuan yang hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu.
4. Strategi pengembangan masyarakat pesisir dalam meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan meliputi 1) Pelatihan produk-prosuk hasil olahan ikan, 2) Pelatihan kepada masyarakat pesisir pantai tentang pelestarian laut dan

lingkungan pesisir pantai, 3) Pembinaan kepada masyarakat terkait kewirausahaan, 4) Membatasi produk perikanan dari luar daerah, 5) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga laut dan lingkungan, 6) Menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholders meningkatkan pengetahuan masyarakat pesisir terhadap dunia usaha. Konsep pemberdayaan masyarakat di pesisir Teluk Semaka yaitu pemberdayaan yang berbasis komunitas atau masyarakat untuk penguatan kemandirian nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abibu, U. (2007). *Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Konawe*. Tesis. Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Program Pascasarjana Universitas Haluoleo. Kendari.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2018. *Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus
- Cook, S., & Macaulay, S. (1997). *Practical steps to empowered complaint management. Managing Service Quality: An International Journal*, 7(1), 39-42.
- Huda, N. (2005). *Dampak Pemberian Kredit Mikro terhadap pendapatan Masyarakat perdesaan melalui Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat dari Program Pemberdayaan Masyarakat (CERD) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar*. Tesis Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Kusnadi, dkk. (2009). *Keberdayaan Nelayan & Dinamika Ekonomi Pesisir*. Penerbit Ar-Ruzz Media. Yogyakarta
- Latif, A. Gunawan. (1999). *Peran LSM dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam di Pulau Barang Caddi Kota Makasar*. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor .
- Mantra, I. B. 2004. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mosher, A.T. 1965. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. (disadur oleh Krisnandhi dan Bahrin Samadm tahun 1981). Yasa Guna. Jakarta.
- Rahim, Manat., M. Tahir., dan W.A. Rumbia. 2014. *Model Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Menanggulangi Kemiskinan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara*. *Joirnal the Winners*. Vol. 15 No 1. Hal.23-33
- Wantah, Edwin. 2017. *Pemberdayaan Nelayan Berbasis Pendidikan Ekonomi dan Potensi Pesisir di Kbupaten Minahasa Utara*. *Jurnal Teori dan Praktis Pembelajaran IPS*. Vol. 2 No 2 hal. 43-51

- Asngari, P.S. 2001. Peranan Agen Pembaharuan/Penyuluhan dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah. Fakultas Peternakan IPB, Bogor.
- Bandura, A. 1997. *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York, Freeman.
- Chambers, Robert. 1996. *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa Secara Partisipatif*. Alih Bahasa oleh Y. Sukoco. Kanisius, Yogyakarta.
- Fukuyama, F. 2000. *Social Capital*. In *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. Edited by L.E Harrison dan S.P Huntington. Basic Books. New York.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2010. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Edisi ke-3. Alih Bahasa oleh Sastrawan Manullang, Nurul Yakin dan M. Nursyahid. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Juran, J.M. 1993. *Quality Control Handbook*. McGraw-Hill, New York.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2002. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumardjo, Fatchiya, A, dan Sjarief. R. 2013. Kajian Model Pemberdayaan Ketahanan Pangan di Wilayah Perbatasan Antar Negara. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, April 2014 Vol. 19 (1): 9-13 ISSN 0853 – 4217
- Suryanti, Rani. 2011. Penerapan Integrasi Usaha Tanaman dan Ternak serta Kebutuhan Penyuluhan Pertanian (Kasus Integrasi Usaha Kakao dan Sapi Di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota). Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- Siegel, S. 1985. *Statistika Non-Parametrik untuk ilmu-Ilmu Sosial* (terjemahan Zanzawi Suyuti). Jakarta: PT. Gramedia.
- Solimun. 2002. *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM) Lisrel dan Amos*. Malang: Fakultas MIPA, Universitas Brawijaya.
- Supranto, J. 2004. *Analisis Multivariat: Arti dan Interpretasi*. Jakarta: Penerbit P.T. Rineka Cipta.
- Syahyuti. 2003. *Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Taylor, D.R.F. dan McKenzie. 1992. *Development From Within*. London Routledge. Chapter 1 dan 10.
- Uphoff, Norman. 1986. *Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases*. Kumarian Press.